

**KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA DAN *CIVIL SOCIETY* DALAM
PROGRAM REVITALISASI CAGAR BUDAYA DI KOTA METRO
(STUDI PADA KEGIATAN *METRO CULINARY NIGHT AND
FINANCE FEST 2023*)**

(Skripsi)

**Oleh :
Aurel Dhea Fernanda
2016041065**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA DAN *CIVIL SOCIETY* DALAM PROGRAM REVITALISASI CAGAR BUDAYA DI KOTA METRO (STUDI PADA KEGIATAN *METRO CULINARY NIGHT AND FINANCE FEST 2023*)

Oleh

AUREL DHEA FERNANDA

Penelitian ini membahas mengenai proses kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan *civil society* dalam program revitalisasi situs bersejarah di Kota Metro, dengan fokus pada studi kasus kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*. Kolaborasi ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui berbagai kegiatan seperti bazar kuliner, sosialisasi literasi keuangan, *talkshow heritage*, lomba menggambar dan mewarnai, serta *live music* dan *stand up comedy*. Penelitian ini menganalisis peran masing-masing sektor dalam kegiatan tersebut serta dampaknya terhadap pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan kerangka kolaborasi dari Huxham dan Vangen (1996) yang meliputi enam dimensi/tahapan, yaitu *managing aims*, *compromise*, *communication*, *democracy and equality*, *power and trust*, serta *determination*, *commitment*, and *stamina*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui observasi lapangan, studi pustaka, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengelolaan tujuan yang memudahkan proses kolaborasi melalui misi bersama, kompromi melalui kesepakatan formal komunikasi terbuka, kesetaraan dalam pengambilan keputusan, terbentuknya komitmen dan kepercayaan yang menjadi kekuatan dalam menentukan keberhasilan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*, serta pencapaian hasil yang bermanfaat bagi setiap *stakeholder* dan berdampak positif pada program revitalisasi situs bersejarah.

Kata kunci : *Multi-sektor, Pengembangan Situs Bersejarah, Budaya dan Ekonomi*

ABSTRACT

GOVERNMENT, PRIVATE SECTOR AND CIVIL SOCIETY COLLABORATION IN CULTURAL HERITAGE REVITALIZATION PROGRAM IN METRO CITY (CASE STUDY OF METRO CULINARY NIGHT AND FINANCE FEST 2023)

By

AUREL DHEA FERNANDA

This research discusses the collaboration process between the government, private sector, and civil society in the heritage site revitalization program in Metro City, focusing on the case study of the Metro Culinary Night and Finance Fest 2023. This collaboration aims to preserve cultural heritage and promote local economic growth through various activities such as culinary bazaars, financial literacy socialization, heritage talk shows, drawing and coloring competitions, and live music/stand-up comedy. The research analyzes the roles of each sector in these activities and their impact on the utilization and development of cultural heritage in Metro City. The study examines collaboration through the six dimensions/stages of Huxham and Vangen (1996), which are managing aims, compromise, communication, democracy and equality, power and trust, and determination, commitment, and stamina. The research method used is qualitative, with data obtained through field observations, literature studies, and interviews. The results of this study indicate the presence of goal management to facilitate the joint process with a shared mission, compromise referring to formal mutual agreements, open communication, equality in decision-making, the formation of commitment and trust as strengths in determining the success of the Metro Culinary Night and Finance Fest 2023, and the achievement of results by each stakeholder, impacting the heritage site revitalization program.

Keywords: Multi-sector, Historic Site Development, Culture and Economy

**KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA DAN *CIVIL SOCIETY* DALAM
PROGRAM REVITALISASI CAGAR BUDAYA DI KOTA METRO
(STUDI PADA KEGIATAN *METRO CULINARY NIGHT AND
FINANCE FEST 2023*)**

Oleh

AUREL DHEA FERNANDA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA
DAN CIVIL SOCIETY DALAM PROGRAM
REVITALISASI CAGAR BUDAYA DI KOTA
METRO (STUDI PADA KEGIATAN METRO
CULINARY NIGHT AND FINANCE FEST
2023)**

Nama Mahasiswa

: Aurel Dhea Fernanda

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2016041065

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP. 19840630 201504 2 002

Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.
NIP. 19910924 201903 2 019

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 1974050220 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

Ketua : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.

Sekretaris : Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.

Penguji : Dr. Dian Kagungan, M.H.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Agustus 2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 22 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Aurel Dhea Fernanda
NPM 2016041065

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aurel Dhea Fernanda, lahir di Kota Metro, Kecamatan Metro Pusat, Provinsi Lampung pada tanggal 24 Juli 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yulian Syaifullah dan Ibu Ulivia Indriasari dan memiliki dua orang adi bernama Laudya Saskia Fernanda dan Thalita Malika Fernanda. Penulis bertempat tinggal di Jalan Hasannudin, Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro, Kota Metro, Provinsi Lampung.

Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak di TK Dewi Sartika pada tahun 2008 yang kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Metro Pusat yang diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2017 dan dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa kegiatan organisasi yang ada di kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada Januari-Februari 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, kemudian dilanjutkan melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada bulan Februari-Agustus 2023.

MOTTO

**“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. ”**

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

**“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang
membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu
tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”**

(Ika df)

“ A negative mind will never give you a positive life”

(Unknown)

“I’m doing this for future me, so that she gets to live the life that she deserves”

(Unknown)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah
Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan ketulusan hati dan kasih sayang yang besar,
Aku persembahkan karyaku ini sebagai bentuk cinta dan terimakasihku
kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Segala pencapaian ini tidak terlepas dari ridho dan doa yang telah bapak dan ibu panjatkan kepada Allah Swt. Terimakasih atas segala dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak terhitung. Semoga pencapaianku ini menjadi awal untuk membuat kalian bangga dan bahagia.

Keluarga Besar dan Sahabat,

Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga semua doa baik dan kebaikan berbalik kepada kalian.

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah mencurahkan segala berkah, ridho, dan hidayah-Nya sehingga telah diselesaikannya skripsi dengan judul **“Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Civil Society dalam Program Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Metro (Studi pada Kegiatan Metro Culinary Night and Finance Fest 2023)”** sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini yang akhirnya dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan, serta saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala ilmu pengetahuan, doa, bimbingan, perhatian, motivasi, saran, dan kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi. Segala masukan yang ibu berikan menjadi wawasan dan pelajaran untuk saya.
2. Ibu Vina Karmilasari S.Pd.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan segala arahan, tenaga, bimbingan, dan bekal pengetahuan kepada saya dalam menjalani perkuliahan dan dalam proses penyelesaian skripsi. Segala masukan yang ibu berikan menjadi tambahan wawasan dan pelajaran bagi saya.
3. Ibu Dr. Dian Kagungan,M.H selaku Dosen Penguji, terima kasih atas saran dan kritik yang membangun dan mendorong yang diberikan sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial. Terima kasih atas motivasi yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih untuk segala dedikasi dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan, semoga dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup yang bermanfaat kedepannya.
7. Seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara atas segala bantuannya dalam berbagai administrasi dalam kegiatan perkuliahan dan dalam proses skripsi.
8. Seluruh staff Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yaitu Ibu Siti Rogayati Seprita, Ibu Ni Nyoman Wiwi Budiadnyani, Bapak Fatwa Rizani, Ibu Endang Sukaisih, Bapak Gusti Putu Anom Aribawa, Ibu Yenny Herfitawati, Ibu Nadya Mutiara Rani, Bapak Haris Setiawan, Bapak Rizki Wanda. Terima kasih telah membantu serta memberikan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Seluruh informan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, MpOne, Bank Mandiri, Tim Metro *Creative Production*, Pelaku UMKM, Tim Ahli Cagar Budaya, dan masyarakat yang belum bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Orang tua penulis yaitu Bapak Yulian Syaifullah, Bapak Sally Ardi, dan Ibu Ulivia Indriasari. Terima kasih sudah memberikan cinta dan kasih sayang, doa, serta dukungan setiap harinya. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan selama ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, kebahagiaan, dilindungi oleh Allah Swt dimanapun berada, serta keberkahan dunia akhirat. Terima kasih juga kepada adik-adikku tersayang, Laudya Saskia Fernanda dan Thalita Malika Fernanda atas segala bentuk dukungan, doa, dan perhatian yang selama ini diberikan. Semoga kelak dipermudah dalam segala urusan mengejar cita-cita.
11. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan sehingga

penulis bisa sampai pada titik ini.

12. Sahabat-sahabatku sejak SMA yaitu Virginia Listanti Noufa dan Salsabila Uniaga, yang sudah menemani di setiap masaku dan siap sedia telinga dan tenaganya untuk membantuku. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk setiap keluh-kesahku, terima kasih sudah mendukung dan selalu ada untuk menyakinkan semua keraguanku. Semoga kalian selalu ada disetiap proses kedepannya dan selalu menjadi teman yang baik, begitu juga aku untukmu.
13. Sahabat- sahabatku sejak SMP yaitu Chantrika Anindhia dan Zidny Salma Fiona yang selalu menjadi tempat nyaman dan memberikan kekuatan dalam setiap keadaan, selalu ada dalam setiap prosesku dari masa SMP hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan dan kehadirannya disetiap moment kehidupan penulis. Semoga kita bisa terus terhubung dan saling mendukung satu sama lain terkait dengan impian kita bersama.
14. Sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan yaitu stressy, Assyifa Aromathis, Bunga Putri Ananda, Wikke Widya Ariyani, Riska Amanda, dan Syevana Imania Putri yang telah mewarnai kisah perkuliahan penulis, tempat berbagi keluh kesah selama perkuliahan. Terima kasih telah menjadi teman berjuang yang sangat baik, berbagi tawa, tangis, cerita dan sudah memberikan banyak dukungan, validasi, serta energi baik kepada penulis. Semoga kita terus dapat berteman dan berhasil mencapai cita-cita yang diimpikan.
15. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Mirza Ristandi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kamu lalui.
16. Teman- teman kelas Reguler A, terima kasih untuk kebersamaan, kerja sama, dukungan yang baik dari awal perkuliahan hingga pada tahap ini.
17. Seluruh teman-teman Adamantia, terima kasih untuk setiap kebersamaan

baik suka maupun duka selama masa perkuliahan.

18. Seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
19. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Terakhir, semoga segala kebaikan dan keberkahan selalu dilimpahkan oleh Allah Swt. Kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya,

Metro, Agustus 2024
Penulis,

Aurel Dhea Fernanda

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Governance	13
2.3. Konsep Kolaborasi.....	16
2.3.1. <i>Collaborative Governance</i>	20
2.3.2. <i>Proses Collaborative Governance</i>	23
2.4. Program Revitalisasi Cagar Budaya	30
2.5. <i>Metro Culinary Night</i>	36
2.6. Kerangka Pikir	38
III. METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Tipe Penelitian	41
3.2. Fokus Penelitian.....	41
3.3. Lokasi Penelitian	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5. Jenis dan Sumber Data Penelitian	51
3.6. Teknik Analisis Data	52
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	53
IV. PEMBAHASAN	55
4.1. Gambaran Umum Kota Metro	55
4.1.1. Sejarah Singkat Kota Metro	55
4.1.2. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi	56
4.1.3. Visi dan Misi Kota Metro	59
4.1.4. Program Revitalisasi Cagar Budaya Rumah Asisten Wedana ...	61
4.1.5. <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i>	66
4.2. Hasil Penelitian	74
4.2.1. <i>Managing Aims</i> (Pengelola Tujuan)	75
4.2.2. <i>Compromise</i> (Kompromi)	87
4.2.3. <i>Communication</i> (Komunikasi).....	92
4.2.4. <i>Democracy and Equality</i> (Demokrasi dan Kesetaran).....	98
4.2.5. <i>Power and Trust</i> (Kekuatan dan Kepercayaan)	103
4.2.6. <i>Determination, Commitment, and Stamina</i> (Tekad, Komitmen, Daya Tahan)	110
4.2.7. Pencapaian Hasil Kolaborasi Program Revitalisasi Cagar	

	Budaya dalam Kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance</i> <i>Fest 2023</i>	115
4.3.	Pembahasan	126
4.3.1.	<i>Managing aims</i> (pengelola tujuan)	127
4.3.2.	<i>Compromise</i> (Kompromi)	136
4.3.3.	<i>Communication</i> (Komunikasi).....	139
4.3.4.	<i>Democracy and Equality</i> (Demokrasi dan Kesetaraan).....	143
4.3.5.	<i>Power and Trust</i> (Kekuatan dan Kepercayaan)	149
4.3.6.	<i>Determination, Commitmen and Stamina</i> (Tekad, Komitmen, Daya Tahan).....	153
4.3.7.	Pencapaian Hasil Kolaborasi Program Revitalisasi Cagar Budaya dalam Kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance</i> <i>Fest 2023</i>	157
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	161
5.1.	Kesimpulan.....	161
5.2.	Saran	163
	DAFTAR PUSTAKA	166
	LAMPIRAN	174

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Anggaran Belanja Daerah Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	1
2. Daftar Partisipan <i>Event Metro Culinary and Finance Fest</i> tahun 2023	5
3. Struktur Organisasi <i>Metro Creative Production</i> dalam <i>Event Metro Culinary and Finance Fest</i> tahun 2023.....	37
4. Informan Penelitian.....	44
5. Daftar Observasi Lokasi Penelitian.....	47
6. Data Dokumen Penelitian	50
7. Kondisi Geografis Kota Metro.....	59
8. Tujuan dan Peran <i>Stakeholder</i> dalam kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i>	77
9. Matrik Hasil Penelitian	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Proses Kolaborasi Ring dan Van de Van	26
2. Proses Revitalisasi (RIS) Dokter Swoning	33
3. Bantuan Pengembangan Rumah Informasi Sejarah (RIS)	34
4. Pemanfaatan Rumah Informasi Sejarah (RIS).....	35
5. Kerangka Pikir	40
6. Peta Administrasi Kota Metro.....	57
7. Rumah Kediaman Asisten Wedana Tempo Dulu	62
8. Pemugaran Atap Rumah Asisten Wedana	63
9. Kegiatan <i>Metro Clothing Night</i> 2023	64
10. Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya Rumah Asisten Wedana	65
11. Kegiatan Sosialisasi Cinta Bangsa dan Paham Rupiah	67
12. Kegiatan Sosialisasi Nabung Saham dan Emas	68
13. Kegiatan Peluncuran Buku Anti Korupsi dan Sosialisasi PBB	69
14. Kegiatan Lomba Menggambar dan Mewarnai	70
15. Foto Gratis UMKM	71
16. <i>Stand Up Comedy</i> dan <i>Live Music</i>	72
17. Kegiatan Poundfit dan Pameran Lukisan.....	73
18. Rapat terkait Pengelola Tujuan.....	83
19. Rapat Kompromi terkait Surat Perjanjian Kegiatan	88
20. Kegiatan Menggambar dan Mewarnai Cagar Budaya	95
21. CSR Kegiatan Metro Culinary Night and Finance Fest 2023.....	116
22. Area Luar Wedana <i>Space</i>	118
23. Area Samping Wedana <i>Space</i>	118
24. Area dalam Wedana <i>Space</i>	119
25. Kegiatan di Wedana <i>Space</i>	122

DAFTAR SINGKATAN

BAPER	: Bayar Pajak Ceria
BNI	: Bank Negara Indonesia
BPCB	: Balai Pelestarian Cagar Budaya
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPPRD	: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
HC	: <i>Health Center</i>
IETD	: <i>Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah</i>
LCC	: Lomba Cerdas Cermat
MB2	: Metro Bangga Beli
MCN	: <i>Metro Culinary Night</i>
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MCP	: <i>Metro Creative Production</i>
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PKP	: Perumahan dan Kawasan Permukiman
QRIS	: <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
RIS	: Rumah Infomasi Sejarah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEKAM	: Sentra Kreatif Masyarakat
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
TACB	: Tim Ahli Cagar Budaya
TP2DD	: Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma pemanfaatan cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Metro memiliki visi menjadi kota yang berbudaya sehingga dalam mencapai visi ini, Kota Metro berusaha memanfaatkan peluang dari keberadaan peninggalan-peninggalan bangunan cagar budaya dari era kolonisasi. Secara resmi, Kota Metro memiliki tujuh cagar budaya yaitu: Rumah Informasi Sejarah (RIS) Dokter Swoning, Klinik Santa Maria, Menara Masjid Taqwa, *Health Center* (HC), Rumah Asisten Wedana, Sumur Hibah Imopuro, dan Sepeda Suster Ludana. Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro bertanggung jawab dalam melaksanakan program pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang menjadi prioritas pemerintah. Untuk mendukung program ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran dana sebagai berikut.

Tabel 1. Anggaran Belanja Daerah Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARANTAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	604.905. 400	585.548.694
Perlindungan Cagar Budaya	405.771.900	398. 422.594
Pengembangan Cagar Budaya	199.133.500	187.126.100
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARANTAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	217.115.200	212.600. 462
Penetapan Cagar Budaya	50.000.000	46. 400.000
Perlindungan Cagar Budaya	150.312.200	149. 400. 462
Pemanfaatan Cagar Budaya	16.800.000	16.800.000

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021-2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro untuk program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Pada tahun 2021, anggaran untuk perlindungan dan pengembangan cagar budaya

berjumlah Rp604.905.400 sedangkan pada tahun 2022, anggaran untuk penetapan, perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya hanya berjumlah Rp217.115.200. Berdasarkan pra riset yang saya lakukan dengan Kepala Bidang Kebudayaan, Siti Rogayati Sepritayang menyatakan bahwa anggaran yang semulanya mencapai Rp604.905.400 pada tahun 2021 menjadi hanya Rp217.115.200 diakibatkan oleh adanya *refocusing* anggaran sebagai respon pemerintah atas situasi dan kondisi pandemi *covid 19*. Pada tahun 2022 pemerintah mulai mengalokasikan dana anggaran dalam program pemanfaatan cagar budaya senilai Rp16.000.000 yang saat ini dinilai masih minim dan hanya berfokus pada pemanfaatan cagar budaya yang bersifat seremonial tanpa melibatkan masyarakat.(Wawancara, 18 Oktober 2023).

Menurut wawancara pra-riset dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Oki Hajiansyah Wahab, beliau menjelaskan bahwa terdapat fenomena atau permasalahan yang terkait dengan pemanfaatan cagar budaya di Kota Metro yaitu dengan mempertimbangkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pemanfaatan bangunan cagar budaya di Kota Metro yang sangat minim, pemerintah percaya bahwa revitalisasi fisik hanya akan membebani anggaran tanpa mengetahui seberapa besar kontribusinya pada peningkatan pendapatan daerah. Sedangkan anggaran yang dialokasikan dalam pengelolaan cagar budaya sangat besar dalam perlindungan dan pengembangan cagar budaya serta saat ini Kota Metro sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peraturan Wali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya yang menjadi payung hukum dalam pengelolaan cagar budaya yang pertama di Lampung serta sudah terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan bangunan cagar budaya yang optimal agar upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro tidak hanya berhenti dalam perlindungan dan pengembangan saja. Pemanfaatan bangunan- bangunan cagar budaya harus meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan karena bangunan

cagar budaya di Kota Metro hanya memiliki nilai sejarah dan kurang populer, sehingga tidak dapat menarik wisatawan dari luar Kota Metro dan aspek pariwisata untuk meningkatkan ekonomi Kota Metro. (Wawancara, 18 Oktober 2023).

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah menginisiasi Program Revitalisasi Cagar Budaya. Program Revitalisasi Cagar Budaya adalah program unggulan Walikota Metro untuk memanfaatkan aset budaya kota. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan visi menjadi kota yang berbudaya. Menurut Soedarsono (2010) revitalisasi adalah upaya untuk mem “vital” kan atau menghidupkan kembali sesuatu yang masih memiliki makna dan kemudian perlu dijaga dan dikembangkan untuk mempertahankannya. Menghidupkan kembali ini mencakup *intervensi* fisik dan non-fisik. Revitalisasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian keindahan fisik, namun juga perlu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengenalan budaya yang sudah ada. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sekedar mendukung elemen formal yang membutuhkan partisipasi masyarakat, namun juga melibatkan masyarakat dalam arti luas, bukan hanya masyarakat di lingkungan sekitar (Laretna, 2002).

Seluruh kelompok kebudayaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian cagar budaya harus lebih kreatif dan mendorong orang dari berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya jika pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memanfaatkannya. Selain itu, dalam wawancara pra-riset dengan Kepala Bidang Kebudayaan, Siti Royagati Seprita beliau juga mengungkapkan selainnya alokasi dana yang minim, SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan cagar budaya masih terbatas, serta pemerintah mempunyai tupoksi yang terbatas dalam pengelolaan cagar budaya. Sehingga upaya untuk merevitalisasi fasilitas kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) berusaha untuk membuka peluang untuk memanfaatkan bangunan cagar budaya di Kota Metro sebagai

ruang publik untuk aktivitas pendidikan, rekreasi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu bentuk program dalam memanfaatkan bangunan cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya program unggulan Revitalisasi Cagar Budaya yang melibatkan *multistakeholder* seperti pemerintah, swasta, dan *civil society*. Salah satu acara yang sedang berkembang dalam upaya untuk memanfaatkan bangunan cagar budaya adalah *Metro Culinary Night*. (Wawancara, 18 Oktober 2023).

Metro Culinary Night muncul sebagai upaya pemerintah untuk merevitalisasi cagar budaya dalam pemanfaatan cagar budaya Kota Metro, yaitu Rumah Asisten Wedana. Gagasan ini muncul sebagai hasil dari kenyataan bahwa pemanfaatan cagar budaya di Kota Metro belum memiliki acara berskala besar yang mampu mempresentasikan cagar budaya yang ada di Kota Metro ke masyarakat maupun ke luar daerah Kota Metro. Kegiatan ini sudah diselenggarakan dua kali pada tahun 2023 yaitu pada bulan Maret dalam kegiatan *Kick Off* Revitalisasi Rumah Asisten Wedana. Rangkaian acara yang digelar yakni, Lomba Cerdas Cermat, *Festival Clothing*, *Festival Kuliner* hingga *Heritage Tour*. Kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada bulan November yang bertepatan pada Pekan Kebudayaan Nasional dan Bulan Inklusi Keuangan. Acara ini berlangsung selama tujuh hari yang setiap harinya terdapat kegiatan yang berbeda.

Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu berkolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola kegiatan ini sendirian. Penelitian Rudi (2021) juga menegaskan pentingnya kerjasama antar *stakeholders* untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Berikut adalah daftar partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest 2023*.

Tabel 2. Daftar Partisipan *Event Metro Culinary and Finance Fest* tahun 2023

No	Lembaga	Instansi/ Organisasi
1	Pemerintah	a. BPPRD b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian c. Bank Mandiri d. OJK e. Pegadaian
2	Swasta	a. Mayora b. Kalbe Farma c. Brightgass d. MpOne
3	<i>Civil Society</i>	a. Metro Creative Production b. UMKM c. Komika d. Pelukis e. Pushbike f. Bengkel Rambut Amazing g. HeyOu Music Project h. Poundfit Metro i. Lazismu

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Terlihat pada tabel 2 partisipan yang terlibat dalam kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest 2023* sangat banyak yang terdiri dari lembaga pemerintah, swasta, dan *civil society*. Keterlibatan aktor non-pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary Night* membentuk sebuah kolaborasi. Peran lembaga pemerintah dalam kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* ialah sebagai regulator Program Revitalisasi Cagar Budaya dan bertugas untuk memfasilitasi masyarakat. Selanjutnya peran swasta dalam proses kolaborasi disini sebagai penyedia alat dan pelatihan untuk menghidupkan cagar budaya. Lalu yang terakhir, peran *civil society* atau masyarakat merupakan aktor penting dalam menghidupkan cagar budaya, tidak hanya sebagai partisipasi namun juga ikut turut untuk berinovasi dalam pelaksanaan kolaborasi kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan seharusnya tidak terbatas pada pemeliharaan objek wisata saja, tetapi juga harus dimaksimalkan dalam proses pengembangan, perencanaan, serta peningkatan ekonomi di sekitar destinasi wisata (Yasintha, 2020).

Berdasarkan wawancara pra-riset dengan Nindi Ika Wulandari selaku koordinator acara kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tujuan terjadinya kolaborasi yaitu dalam pemanfaatan cagar budaya berdasarkan adanya Perda dan Perwali dalam pengelolaan cagar budaya dalam hal pemanfaatan bangunan cagar budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sudah berjalan dengan sesuai dengan terlihatnya keberhasilan seluruh *stakeholder* yang terlibat sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing *stakeholder*, contohnya meningkatkannya kemudahan pelayanan pembayaran pajak dengan adanya 421 orang yang membayar SPPT dan total uang yang masuk selama pembayaran pajak adalah Rp43.766.667. Selain itu, bisnis UMKM terus mengalami peningkatan harian selama kegiatan berlangsung. Partisipasi publik terhadap cagar budaya pun meningkat dalam membantu pertumbuhan perekonomian Kota Metro. Kesuksesan acara ini mendorong banyak orang untuk bekerja sama untuk memajukan cagar budaya dengan beberapa perusahaan telah memasukan CSR mereka kedalam cagar budaya. (Wawancara, 20 Oktober 2023).

Nindi juga mengungkapkan bahwa dalam proses kolaborasi pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* masih terdapat berbagai hambatan, seperti komunikasi belum berjalan dengan efektif, terdapat beberapa pihak terutama pihak swasta dan pihak *finance* yang tidak dapat mengikuti beberapa pertemuan diskusi yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian waktu atau jadwal untuk melakukan proses komunikasi. Terlebih lagi tidak adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai suatu perjanjian kesepakatan tertulis yang mengikat seluruh pihak untuk melakukan suatu kerjasama. Hal ini dikarenakan waktu kegiatan yang minim. Tetapi, untuk surat perjanjian kerjasama antar pelaku bisnis ada yang mengikat panitia, Bank Mandiri serta pelaku UMKM. Lalu adanya perbedaan pendapat dan cara kerja antar *stakeholder* selama proses

kolaborasi yang harus dihadapi untuk meminimalisir masalah. (Wawancara, 20 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil pra-riset, diketahui bahwa kerjasama ini terbentuk karena adanya keterbatasan dan ketergantungan pada sumber daya serta minimnya anggaran untuk menjalankan program revitalisasi cagar budaya, yang tidak memungkinkan untuk berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah maupun pihak non-pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Almaahi (2022) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan program pelestarian budaya daerah melalui festival langkisau di Kabupaten Pesisir Barat, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat membutuhkan kerjasama dengan lembaga non-pemerintah dan masyarakat, mengingat pemerintah memiliki keterbatasan, terutama dalam hal sumber daya manusia.

Pemerintah tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menangani kegiatan ini secara mandiri. Oleh karena itu, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai regulator bekerja sama dengan aktor non-pemerintah untuk menjalankan Program Revitalisasi Cagar Budaya melalui pelaksanaan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*. Pihak-pihak yang terlibat termasuk sektor swasta dan masyarakat umum, dengan harapan bahwa partisipasi masyarakat dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kecintaan terhadap budaya mereka. Setiap *stakeholder* membangun hubungan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing.

Pernyataan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa penelitian yang ada sebelumnya memiliki permasalahan yang hampir sama terkait dengan konsep kolaborasi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis lebih lanjut mengenai konsep kolaborasi menggunakan teori oleh Huxham dan Vangen (1996) dalam kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* sekaligus mengetahui pencapaian hasil dalam kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest 2023* yang nantinya dapat dijadikan rekomendasi dan saran terkait pelaksanaan kegiatan ini di kemudian

hari agar menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat permasalahan dalam membentuk sebuah kolaborasi seperti komunikasi dan yang merupakan hal penting dalam sebuah proses kolaborasi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi acara ini sebenarnya di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest 2023*.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang "Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan *Civil Society* dalam Program Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Metro (Studi pada Kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses kolaborasi pemerintah, swasta, dan *social society* dalam Program Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Metro (studi pada kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest tahun 2023*)?
2. Bagaimana pencapaian hasil kolaborasi dalam Program Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Metro (studi pada kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest tahun 2023*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi dalam program revitalisasi cagar budaya di Kota Metro melalui kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest 2023*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, dan bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Program Revitalisasi Cagar Budaya yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga dapat menentukan keberlanjutan kegiatan tersebut di masa depan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan masyarakat Kota Metro terhadap cagar budaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dengan menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan untuk menganalisis proses kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam Program Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Metro melalui kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest 2023*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dan pemahaman yang luas mengenai proses kolaborasi Dalam Program Revitalisasi Fasilitas Kebudayaan pada cagar budaya di Kota Metro.
- b. Bagi Instansi terkait diharapkan dapat membantu sebagai masukan bagi pemerintah terkait proses kolaborasi dalam Program Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Metro pada kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest 2023*.
- c. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi terkini dan dapat memberikan informasi tambahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui dan menjaga cagar budaya di Kota Metro.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam program revitalisasi cagar budaya melalui acara kebudayaan dapat ditemukan dalam penelitian Almaahi, dkk (2022) yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah Melalui Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash (2008) untuk menganalisis proses kolaborasi dan menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesisir, Provinsi Sumatera Barat, kolaborasi antara Pemerintah Kota dan Sanggar Seni Nan Gombang dalam Festival Langkisau melibatkan partisipasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Sanggar Seni Nan Gombang, serta masyarakat setempat. Namun, dalam dimensi akseptasi, belum ada bukti kerjasama formal seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani. Di sisi lain, dimensi komunikasi, kepercayaan, dan berbagi telah berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Saputra, dkk (2022) yang berjudul “*Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif Lampung dalam Perspektif Collaborative Governance*”, dalam penelitian ini menggunakan teori kolaborasi dari Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berjalan dengan baik, ditandai oleh prinsip-prinsip kolaborasi seperti komitmen, kepercayaan, tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan sumber daya. Namun, pemerintah Provinsi Lampung masih perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang efektif dan komitmen bersama untuk memajukan dan mencapai tujuan pembangunan daerah wisata.

Penelitian lain yang berkaitan dengan kolaborasi dalam revitalisasi cagar budaya adalah penelitian oleh Karlina (2021) yaitu “ Kolaborasi dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Desa Karangsong” yang menganalisis proses kolaborasi menggunakan teori Huxham dan Vangen (1996). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Desa Karangsong belum terlaksana dengan baik sesuai teori kolaborasi dari Huxham dan Vangen. Terdapat berbagai kendala yang menyebabkan kolaborasi ini belum berjalan sesuai rencana dan belum mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Meskipun proses kompromi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Desa Karangsong telah dilakukan, hasilnya masih belum optimal. Komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat belum efektif, ditandai dengan adanya kesalahpahaman atau benturan kepentingan. Selain itu, frekuensi rapat-rapat kolaborasi semakin berkurang dan melemah dari tahun ke tahun.

Penelitian lain yang menggambarkan proses kolaborasi menggunakan teori Huxham dan Vangen adalah studi oleh Rahman, dkk (2021) yang berjudul “Kolaborasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kreatif di Kota Bandung Studi pada Bandung *Creative Belt* Sektor Cigadung” menemukan bahwa tahap-tahap kolaborasi dalam pengembangan destinasi pariwisata kreatif di Bandung *Creative Belt* sektor Cigadung belum sepenuhnya dilaksanakan. Pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan Bandung *Creative Belt* sektor Cigadung belum memperhatikan aspek-aspek penting dalam proses kolaborasi, seperti adanya ketidaksetaraan di antara para aktor kolaborasi, dominasi kekuatan dari beberapa aktor kolaborasi, dan kurangnya determinasi serta komitmen dari para aktor kolaborasi karena tidak adanya acuan hukum seperti Memorandum of Understanding (MoU). Inisiatif dari aktor bisnis dan masyarakat dalam berkolaborasi masih rendah karena sejauh ini kolaborasi hanya dilakukan jika disosialisasikan oleh pemerintah (Disbudpar Kota Bandung). Selanjutnya, penelitian oleh Serin & Zalli (2023) berjudul

“Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis *Collaborative Governance* oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru” menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan Wisata Kampung Bandar sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu peningkatan dalam hal komunikasi antar pihak terkait dan keterlibatan yang lebih efektif dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga menemukan bahwa belum ada MoU dengan *stakeholder* seperti Sekolah Tinggi Pariwisata Riau atau dengan pihak Bank Indonesia dan PT Pertamina Hulu Rokan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang menyoroti penerapan *collaborative governance* dalam revitalisasi atau pengembangan kawasan cagar budaya. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi semacam ini membutuhkan keterlibatan *multistakeholder* untuk menangani masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh satu organisasi secara mandiri (O’Leary et al., 2006 seperti yang dikutip dalam Maharani, 2022). Kebaruan dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya untuk menganalisis proses kolaborasi antara Pemerintah Kota Metro, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menjalankan Program Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Metro melalui acara kolaborasi seperti Pekan Kebudayaan Nasional dengan Bulan Inklusi Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi oleh Huxham dan Vangen (1996), yang mencakup *Managing Aims* (pengelolaan tujuan), *Compromise* (kompromi), *Communication* (komunikasi), *Democracy and Equality*, *Power and Trust*, serta *Determination, Commitment, and Stamina*. Teori ini dipilih karena relevannya dalam mengelaborasi fenomena permasalahan dalam pelaksanaan kolaborasi Program Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Metro melalui kegiatan Metro Culinary Night and Finance Fest 2023.

2.2. Governance

Pada dasarnya, konsep *governance* awalnya dikembangkan oleh ilmuwan politik dan administrasi publik untuk mencerminkan pandangan baru terhadap pemerintahan. Konsep ini mewakili perspektif institusionalisme baru yang mengalami pergeseran dari konsep "*government*" ke "*governance*", di mana kewenangan pemerintah terhadap kebijakan yang dihasilkan telah berubah. Semangat di balik konsep *governance* adalah bahwa pemerintah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan proses kebijakan yang diterapkan (Rhodes, 2007).

Sorensen dan Triantafyllou (2013) menjelaskan bahwa dalam teori tata kelola (*governance*), upaya dilakukan untuk memahami pendekatan interdisipliner yang berakar pada ilmu politik, administrasi publik, sosiologi, ekonomi, dan hukum. Tata kelola menarik karena menggambarkan bagaimana pemerintah, sebagai aktor negara, melibatkan aktor non-negara seperti sektor swasta dan masyarakat dalam formulasi kebijakan publik secara bersama-sama. Menurut Olson, ciri khas dari tata kelola adalah proses yang terdistribusi, melibatkan banyak pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan tingkat pemerintahan (Rhodes, 2007). Innes dan Booher (2003) juga menekankan bahwa teori tata kelola berfokus pada interaksi dalam jaringan dan kemitraan yang dikembangkan dalam teori perencanaan dan organisasi. Fokus utamanya adalah bagaimana pemangku kepentingan dengan perspektif atau kepentingan yang berbeda dapat berhasil berkolaborasi untuk mencapai kesepakatan bersama..

Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi (2004) mengemukakan bahwa *governance* merupakan jaringan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program dalam proses kebijakan publik. Mereka menjelaskan bahwa *governance* juga mencakup nilai, pengaturan, dan kelembagaan terkait kegiatan program pemerintah, termasuk pendanaan, politik, sosial, dan sumber daya manusia.

Pengelolaannya melibatkan interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis untuk menjalankan peran masing-masing dalam pengambilan keputusan bersama.

Smith dan Osborn (2007) menegaskan pentingnya partisipasi organisasi non-pemerintah (NGO), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*) dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan publik melalui tindakan kolektif dan kolaboratif. Rhodes (1997) mengemukakan bahwa ciri khas dari *governance* adalah organisasi jaringan (*networks*) di mana terdapat arus pertukaran sumber daya yang saling berinteraksi. Lebih lanjut, dalam teori *governance*, karakteristik dari organisasi jaringan termasuk:

- a. Governance meliputi lebih dari konsep *government* dengan mencakup aktor-aktor selain pemerintah (*state*) seperti sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat madani (*civil society*), menunjukkan interdependensi antara organisasi.
- b. Organisasi dalam jaringan (*networks*) terlibat dalam interaksi yang berkelanjutan untuk pertukaran sumber daya dan negosiasi dalam berbagi sumber daya.
- c. Interaksi di dalam *networks* mirip dengan permainan yang terikat oleh kepercayaan dan negosiasi yang disepakati oleh masing-masing organisasi.
- d. *Networks* tidak memiliki kewenangan mutlak dan memberikan otonomi signifikan kepada setiap organisasi. Mereka tidak bertanggung jawab langsung kepada pemerintah (*state*) dan diatur secara tidak langsung dan tidak sepenuhnya.

Osborne (2006) menjelaskan perbedaan antara konsep *governance* dan birokrasi dengan mengidentifikasi ciri-ciri masing-masing. *Governance* memiliki karakteristik seperti *steering* (pengendalian), *empowering* (pemberdayaan), *competition* (kompetisi), *mission driven* (berorientasi misi), *finding outcomes* (mencari hasil), *customer driven* (berorientasi pada

pelanggan), *earning* (penghasilan), *preventing* (pencegahan), *teamwork/participation* (kerja tim/partisipasi), dan *market* (pasar). Di sisi lain, birokrasi ditandai oleh ciri seperti *rowing* (mengayuh), *service* (pelayanan), *monopoly* (monopoli), *role driven* (berorientasi pada peran), *budgeting inputs* (anggaran berdasarkan input), *bureaucracy driven* (berorientasi pada birokrasi), *spending* (pengeluaran), *curing* (penyembuhan), *hierarchy* (hirarki), dan *organization* (organisasi).

Menurut World Bank dalam Sujarwoto (2013), konsep *governance* melibatkan tiga domain utama: *state* (pemerintah), *private sector* (sektor swasta), dan *civil society* (masyarakat madani), yang saling berinteraksi dan menjalankan peran masing-masing. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan aktif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik (Sujarwoto, 2013).

Pada akhirnya, konsep *governance* mendorong penelitian untuk memahami bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan berinteraksi satu sama lain. Proses interaksi ini melibatkan pemetaan hubungan antara aktor di tingkat lokal dengan aktor lain baik secara vertikal maupun horizontal, dan kemudian menganalisisnya dalam berbagai konteks, seperti konteks yang lebih luas, struktural, dan konteks spesifik. Bresser (dalam *Contextual Interaction Theory*) menekankan pentingnya memfokuskan penelitian pada peran sentral aktor dalam proses interaksi. Hal ini melibatkan tiga karakteristik inti: sumber daya kognitif, motivasi, pemurnian motivasi, informasi, dan kekuasaan. Dwiyanto mengemukakan bahwa dalam teori *governance*, peran pemerintah tidak lagi dominan sebagai satu-satunya aktor yang memiliki kekuasaan mutlak dalam pengambilan keputusan kebijakan. Ada keterlibatan aktor publik di luar pemerintah yang juga berperan dalam menentukan kebijakan yang diambil. Meskipun demikian, Dwiyanto

menekankan bahwa posisi pemerintah tetap penting sebagai institusi negara yang mengesahkan keputusan-keputusan publik menjadi legalitas yang sah (Dwiyanto, 2008).

Osborne juga mengulas bahwa konsep *governance* mengubah cara keputusan dalam program-program pemerintah, di mana proses pengambilan keputusan tidak lagi sepenuhnya dalam kendali pemerintah tetapi melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah seperti masyarakat dan pelaku bisnis (Osborne, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa *governance* menciptakan ruang bagi partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam pelaksanaan pemerintahan dan urusan publik, tidak hanya terpusat pada pemerintah semata.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam teori *governance* adalah bahwa konsep ini mencerminkan pergeseran dari pemerintah yang dominan (*government*) ke sistem yang inklusif dan kolaboratif (*governance*), di mana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani bekerja bersama dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. *Governance* mengadopsi pendekatan interdisipliner, menggabungkan politik, administrasi publik, sosiologi, ekonomi, dan hukum untuk memahami dinamika kolaborasi multi-sektor. Organisasi jaringan memainkan peran penting dalam pertukaran sumber daya dan negosiasi antar aktor, dengan pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan regulator yang menciptakan lingkungan kondusif, tanpa memonopoli kekuasaan. Partisipasi aktif dari berbagai pihak meningkatkan transparansi, akuntabilitas, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi kebijakan, menekankan pentingnya interaksi yang dinamis dalam proses pengambilan keputusan publik.

2.3. Konsep Kolaborasi

Kolaborasi menurut Rahardjo (2010), adalah konsep yang melibatkan hubungan antara organisasi, pemerintah, aliansi strategis, dan jaringan

berbagai organisasi. Ini mengimplikasikan kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk mengelola sumber daya yang sama, yang sulit dicapai secara individual. Rahardjo (2010) menjelaskan bahwa kolaborasi membutuhkan pengaturan kerja sama yang terstruktur, kepercayaan yang diperkuat dengan komitmen, serta struktur dan kapasitas kelembagaan yang memadai dari setiap pihak yang terlibat. Ansell dan Gash (2009), di sisi lain, menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kolaborasi. Mereka memetakan kolaborasi dalam dua dimensi, yaitu sebagai sebuah proses dan dalam dimensi normatif. Mereka menyoroti pentingnya bagaimana proses kolaborasi dilakukan dan bagaimana norma-norma dan nilai-nilai mendasar berkontribusi pada dinamika kolaboratif tersebut.

Kolaborasi sebagai sebuah proses mengacu pada kumpulan prosedur atau cara mengatur, mengelola, atau mengawasi secara institusional. Dalam konteks ini, banyak lembaga, baik pemerintah, non-pemerintah, maupun swasta, terlibat sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing. Dalam beberapa kasus, kolaborasi dapat melibatkan hanya institusi pemerintah, masyarakat sipil, atau lembaga swasta. Namun, sering kali kolaborasi juga melibatkan kombinasi antara institusi yang terafiliasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil lokal yang didanai oleh sektor swasta. Meskipun demikian, semua institusi yang terlibat aktif berpartisipasi dalam proses *governance* bersama.

Mengutip teori sebelumnya, dalam konteks penelitian ini, kolaborasi antara organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam Program Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Metro, khususnya dalam acara Metro Culinary and Finance Fest 2023, diklasifikasikan sebagai proses kolaboratif. Menurut Warsono (2009), proses kolaborasi lebih menekankan pada kerja sama daripada sekadar koordinasi. Kolaborasi ini merupakan upaya kolektif untuk membentuk sebuah *entitas* yang didasarkan pada saling menguntungkan dan tujuan bersama antar organisasi atau individu dengan karakteristik yang berbeda. Mereka berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal di bawah aturan yang disepakati bersama dan membangun saling

percaya. Meskipun hasil akhirnya mungkin bervariasi bagi individu, kolaborasi ini tetap menghasilkan manfaat atau hasil bagi kelompok secara keseluruhan. Warsono (2009) juga menekankan bahwa inti dari kolaborasi adalah proses kolektif melalui hubungan formal dan informal yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama, pandangan ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash tentang esensi kolaborasi.

Menurut Ansell dan Gash (2007), yang dikutip dalam Sudarmo (2011), alasan utama untuk melakukan kolaborasi antar sektor adalah sebagai berikut:

1. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar lembaga: Kolaborasi dibutuhkan ketika masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tidak dapat diselesaikan secara efektif secara individual karena kompleksitas dan interdependensi antara mereka.
2. Konflik kepentingan kelompok yang bersifat laten dan sulit direduksi: Kolaborasi memungkinkan berbagai kelompok dengan kepentingan yang mungkin bertentangan untuk bekerja sama mencapai konsensus atau penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.
3. Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik: Kolaborasi dapat menjadi cara untuk memperoleh dukungan dan legitimasi yang lebih luas untuk keputusan atau kebijakan yang diambil, dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam proses pengambilan keputusan.

Ansell dan Gash (2007) juga menjelaskan bahwa faktor-faktor lain yang mendorong kolaborasi meliputi kegagalan dalam mengimplementasikan undang-undang di tingkat lokal, ketidakmampuan kelompok untuk menghalangi keputusan dengan cara lain, dan tingginya biaya politisasi yang disebabkan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Pengembangan organisasi juga menjadi motivasi penting dalam mendorong tren untuk berkolaborasi antar sektor.

Menurut Chris Huxham dan Siv Vangen (2005) kolaborasi adalah proses kerja sama yang dilakukan oleh beberapa organisasi atau individu untuk mencapai

tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara efektif jika dilakukan sendiri-sendiri. Dalam bukunya *"Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage,"* mereka menjelaskan beberapa konsep penting terkait kolaborasi. Konsep *"Collaborative Advantage"* mengacu pada keuntungan yang diperoleh dari kolaborasi yang tidak mungkin dicapai oleh masing-masing pihak jika bekerja sendiri, sehingga tujuan dari kolaborasi adalah untuk mencapai hasil yang lebih besar dari sekadar penjumlahan kontribusi masing-masing pihak. Dalam kolaborasi, sering kali diperlukan tindakan tegas yang disebut *"Collaborative Thuggery"* untuk memastikan kolaborasi berjalan dengan baik, yang mencakup kepemimpinan yang kuat untuk menjaga fokus dan kemajuan kolaborasi. Kepercayaan adalah dasar penting bagi keberhasilan kolaborasi, namun seringkali sulit dibangun dan mudah hilang, sementara kekuasaan dalam kolaborasi harus dikelola dengan hati-hati untuk menjaga hubungan yang harmonis.

Kolaborasi juga sering menghadirkan tegangan antara tujuan individu dan tujuan bersama, sehingga penting untuk mengelola tegangan ini melalui komunikasi yang efektif dan kompromi. Struktur yang jelas seperti peran, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan diperlukan untuk memastikan kolaborasi yang efektif, serta proses kolaborasi harus dirancang dengan baik untuk memastikan kelancaran komunikasi dan koordinasi. Partisipasi aktif dari semua pihak adalah kunci sukses kolaborasi, di mana inklusivitas menjadi penting agar semua pihak merasa diikutsertakan dan memiliki suara dalam proses kolaborasi. Fokus pada hasil yang ingin dicapai daripada proses itu sendiri, serta evaluasi rutin dan penyesuaian strategi kolaborasi diperlukan untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan yang mungkin muncul selama proses kolaborasi juga menjadi aspek penting, mendorong inovasi dan pendekatan baru untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kolaborasi dapat menjadi lebih efektif dan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi

semua pihak yang terlibat.

2.3.1. Collaborative Governance

Collaborative governance adalah pendekatan pengelolaan pemerintahan yang melibatkan aktif pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara secara langsung. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2008).

Menurut Ansell dan Gash (2007), *collaborative governance* adalah suatu bentuk tata kelola yang melibatkan berbagai organisasi atau pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menangani masalah atau kebijakan publik yang kompleks. Pendekatan ini mendorong tercapainya konsensus di antara pemangku kepentingan yang beragam untuk mencapai tujuan bersama. *Collaborative governance* menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam mengungkapkan dan memenuhi kepentingan mereka, dengan fokus pada penciptaan nilai publik yang lebih besar daripada yang dapat dicapai melalui kerja sendiri-sendiri.

“Collaborative governance is defined as a governance arrangement in which one or more public institutions directly engage non-government stakeholders in a formal, consensus-oriented, deliberative collective decision-making process, aimed at making or implementing public policies or managing public programs or assets.”

Menurut Ansell dan Gash, *collaborative governance* terjadi ketika lembaga-lembaga, baik dari sektor publik maupun non-publik, secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, deliberatif, dan berfokus pada pencapaian konsensus. Tujuannya adalah untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik serta menangani masalah-masalah publik yang

kompleks.

Robert dan Taehyon (2010) memiliki pendapat yang sama dengan para ahli sebelumnya:

“Collaborative governance is a collective and egalitarian process in that participants are endowed with substantive authority to make collective decisions, and each stakeholder possesses an equal opportunity for its preferences to be reflected in the collective decision.”

Collaborative governance adalah proses kolektif dan egaliter di mana semua pemangku kepentingan memiliki otoritas substantif yang sama untuk membuat keputusan bersama. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa tujuan dari kerja sama ini adalah untuk menangani masalah-masalah publik atau merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan publik. Ketika organisasi mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari lingkungannya, kesadaran akan pentingnya kolaborasi dalam tata kelola meningkat, karena tidak mungkin bagi satu entitas pemerintahan atau organisasi untuk beroperasi dengan efektif secara mandiri.

Emerson et al. (2012) mengemukakan definisi yang komprehensif tentang *collaborative governance* sebagai proses dan struktur dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen, yang melibatkan partisipasi konstruktif dari berbagai badan publik, level pemerintahan yang berbeda, serta ranah publik, privat, dan sipil. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan publik yang sulit dicapai melalui upaya individual. Menurut Edward DeSeve (dalam Sudarmo, 2015), *collaborative governance* adalah sistem terintegrasi yang mengelola hubungan melintasi batas-batas organisasi formal dan informal, dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi yang jelas mengenai kesuksesan.

Robert dan Choi (2010) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai proses kolektif dan egaliter di mana setiap partisipan memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan, serta setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan aspirasinya dalam proses tersebut. Agrawal dan Lemos (2007) mengemukakan bahwa dalam tata kelola kolaboratif, tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah, tetapi juga mencakup tata kelola multi-partner yang melibatkan sektor privat, masyarakat, dan komunitas sipil. Ini dibangun atas sinergi peran para pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat hibrida, seperti kolaborasi antara sektor publik-swasta dan swasta-sosial.

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif melibatkan proses pembentukan, pengelolaan, fasilitasi, operasionalisasi, dan pemantauan pengaturan organisasi lintas sektoral untuk menyelesaikan masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi atau sektor publik secara mandiri. Tata kelola kolaboratif mewakili paradigma baru dalam memahami peran multistakeholder dalam urusan-urusan publik. Studi tentang kolaborasi penting dilakukan untuk memahami karakteristik hubungan antar aktor dalam konteks ini (Kurniadi, 2020).

Ansell dan Gash (2007) melakukan review terhadap 137 studi tentang collaborative governance dalam bidang kebijakan untuk mengidentifikasi karakteristik organisasi yang mendukung efektivitas kolaboratif. Mereka menyimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam sektor publik melibatkan kerjasama dengan sektor privat dalam proses formulasi, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Proses kolaboratif ini melibatkan siklus yang terus berulang (*cycling process*) di mana para *stakeholder* terlibat secara penuh dalam formulasi dan penetapan kebijakan. Untuk mencapai keberhasilan dalam kolaborasi, penting untuk memulai dengan mengidentifikasi masalah bersama

yang perlu diselesaikan, menetapkan tujuan bersama untuk implementasi kebijakan publik yang efektif, serta membangun waktu, kepercayaan, dan ketergantungan antar aktor.

Kesimpulan dari teori di atas adalah bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan pengelolaan pemerintahan yang melibatkan aktif pemangku kepentingan di luar pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang formal, deliberatif, dan konsensus-oriented, untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta menangani masalah publik yang kompleks. Proses ini menekankan pentingnya partisipasi konstruktif dari berbagai pihak, termasuk sektor publik, privat, dan sipil, untuk menciptakan nilai publik yang lebih besar daripada melalui upaya sendiri-sendiri. Kolaborasi ini membutuhkan pengaturan kerja yang terstruktur, kepercayaan yang diperkuat dengan komitmen, serta kapasitas kelembagaan yang memadai, dengan tujuan mencapai konsensus dan hasil yang saling menguntungkan. Studi menunjukkan bahwa efektivitas kolaboratif dalam sektor publik tergantung pada identifikasi masalah bersama, penetapan tujuan bersama, serta membangun waktu, kepercayaan, dan ketergantungan antar aktor untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif terhadap isu-isu publik yang kompleks.

2.3.2. Proses *Collaborative Governance*

Kerangka proses kolaborasi menunjukkan bahwa kolaborasi berkembang dari waktu ke waktu melalui interaksi antar organisasi, baik secara formal maupun informal, melalui serangkaian tahapan yang meliputi negosiasi, pengembangan komitmen, dan implementasi komitmen tersebut. Para pakar menggambarkan beberapa tahap dalam proses kolaborasi seperti yang diungkapkan oleh Grey (1989), sebagaimana disebutkan dalam penelitian Krane dan Lu (2010), yang

melihat proses kolaborasi sebagai serangkaian strategi untuk mengubah masyarakat melalui kolaborasi pemberdayaan.

Thomson dan Perry (2007) mengemukakan bahwa model *multidimensional* dari proses kolaborasi mencakup dimensi pemerintahan, administrasi, organisasi otonom, kebersamaan, serta norma-norma kepercayaan dan timbal balik. Bryson, Crosby, dan Other (2006) menyajikan enam tahap dalam proses kolaborasi, yang meliputi pembentukan perjanjian awal, pembangunan kepemimpinan, pembangunan legitimasi, pembangunan kepercayaan, manajemen konflik, dan perencanaan. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa komitmen adalah elemen kunci dalam proses kolaborasi, dimulai dari dialog awal, pembangunan kepercayaan, pembentukan komitmen dan pemahaman bersama terhadap proses, hingga pencapaian "small wins" yang memperkuat siklus kolaborasi.

Thomson dan Perry (2007) menjelaskan bahwa kolaborasi adalah suatu proses di mana aktor-aktor yang memiliki otonomi atau semi-otonomi berinteraksi melalui negosiasi, baik secara formal maupun informal, untuk bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka serta cara untuk bertindak atau mengambil keputusan terkait masalah yang mempengaruhi mereka secara kolektif. Proses ini melibatkan pembentukan norma-norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan

Berdasarkan definisi tersebut ada lima dimensi kunci kolaborasi yaitu:

- a. *Governance* (pemerintahan): Para pihak yang berkolaborasi perlu memiliki pemahaman tentang bagaimana mereka secara bersama-sama membuat keputusan tentang aturan-aturan yang akan mengatur perilaku dan hubungan mereka.
- b. *Administration* (administrasi): Kolaborasi bukanlah upaya administrasi mandiri. Organisasi berkolaborasi karena mereka

bertujuan mencapai tujuan tertentu. Struktur administratif mereka berbeda secara konseptual dari pemerintahan karena lebih berfokus pada implementasi dan manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan melalui sistem operasional yang efektif, serta mendukung kejelasan peran dan saluran komunikasi yang efektif

c. *Organizational Autonomy* (otonomi organisasi): Dimensi kolaborasi ini menggambarkan dua dinamika yang terkandung dalam upaya kolaboratif: potensi dan kekecewaan. Para mitra sebenarnya mempertahankan identitas ganda; mereka mempertahankan identitas dan otoritas organisasi yang terpisah dari identitas kolaboratif mereka.

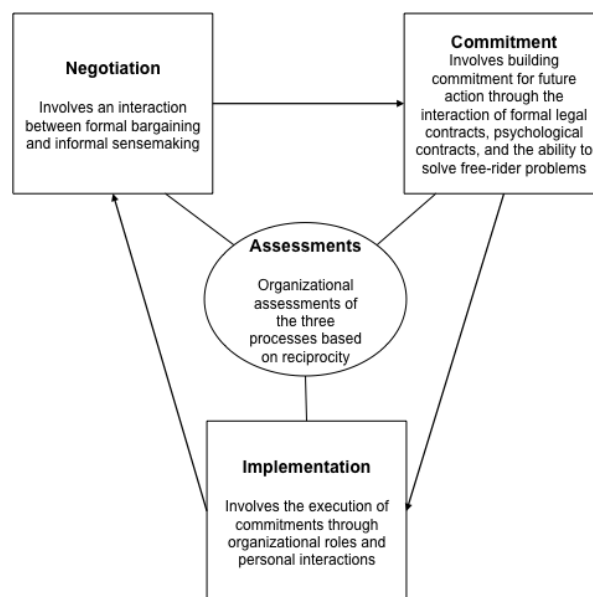
d. *Mutualisme (kebersamaan)*: kebersamaan dalam kolaborasi berakar pada saling ketergantungan. Organisasi yang berkolaborasi harus saling bergantung pada hubungan yang saling menguntungkan, yang didasarkan pada perbedaan atau kepentingan bersama.

e. *Normas* (norma): timbal balik dan kepercayaan saling terkait secara erat secara konseptual. Dalam kolaborasi, organisasi yang berpartisipasi biasanya menunjukkan sikap “*will-if-you-will*” berdasarkan tingkat keterbukaan mental dan komitmen untuk saling memberikan balasan.

Menurut Thomson and Perry (2007), kolaborasi adalah sebuah proses yang berulang dan tidak linear. Ketika organisasi yang terlibat dalam kolaborasi dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi untuk melakukan tindakan bersama, mereka kemudian berkomitmen untuk mengambil langkah awal. Jika tindakan kolektif berjalan dengan baik dan saling menguntungkan, maka organisasi tersebut akan terus atau bahkan memperluas komitmen bersama. Namun, jika komitmen tersebut tidak diikuti dengan implementasi yang memadai, maka para pelaku kolaborasi akan memulai upaya perbaikan, baik melalui negosiasi ulang atau dengan mengurangi tingkat komitmen. Tingkat partisipasi organisasi dalam “*voice*” atau alternatif solusi negosiasi

akan sangat tergantung pada sejauh mana mereka memiliki pandangan yang agregatif atau integratif terhadap kolaborasi tersebut.

Sementara kerangka proses kolaborasi menurut Ring dan Van de Ven (1994) dalam Thomson dan L. Perry (2007) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Proses Kolaborasi Ring dan Van de Van
Sumber : Ring dan Van de Van (1994) dalam Thomson and L. Perry (2007)

Sementara pandangan Chris Huxham dan Siv Vangen (1996) mengemukakan ada enam hal dalam proses kolaborasi antarorganisasi. Keenam hal tersebut adalah:

- a. *Managing aims: aims, goals*, atau tujuan merupakan alasan utama mengapa suatu kolaborasi terjadi dan mengapa para pihak terlibat di dalamnya. Menurut Huxham dan Vangen, terdapat tiga level tujuan yang diusulkan:
 - 1) “*Meta goals*” pada level tertinggi, merupakan pernyataan eksplisit tentang tujuan yang ingin dicapai

secara keseluruhan dalam kolaborasi tersebut.

- 2) Penjelasan mengenai kepentingan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi yang terlibat, yang merujuk pada tujuan-tujuan spesifik atau manfaat yang mereka harapkan dari kolaborasi tersebut.
- 3) Penjelasan mengenai tujuan individu dari masing-masing organisasi yang terlibat, mengacu pada apa yang ingin dicapai.

- b. *Compromise*: kompromi diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan dalam cara kerja, budaya dan gaya kerja individu, serta norma dan nilai organisasi. Proses kompromi melibatkan penciptaan solusi tengah yang dapat mengakomodasi semua pihak terlibat, dengan menghindari penilaian berdasarkan persepsi terhadap pihak lain.
- c. *Communication*: bahasa menjadi perhatian utama dalam komunikasi kolaboratif karena harus disesuaikan dengan konteks, profesi, etnisitas, dan bahasa resmi yang berlaku. Komunikasi yang efektif penting untuk menghindari ambiguitas dalam arti kata yang sama dan untuk memahami dengan jelas keinginan dan tujuan pihak lain.
- d. *Democracy and equality*: dalam konteks kolaborasi, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, identifikasi siapa yang harus terlibat dalam kolaborasi. Kedua, proses kolaborasi harus menekankan pada kesetaraan dan penghargaan terhadap setiap individu yang terlibat. Ketiga, pentingnya akuntabilitas dan representasi, termasuk dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap organisasi dan konstituen mereka.
- e. *Power and Trust*: secara psikologis, kolaborasi digunakan untuk mengatasi rasa rendah diri dalam komunitas lokal dan sekaligus mengurangi rasa superioritas lembaga pemerintah dan institusi global.

Dalam konteks ini, kekuasaan dan kepercayaan diilustrasikan dengan lembaga pemerintah yang berperan sebagai penyandang dan ahli dalam kolaborasi, sementara kelompok kecil dalam komunitas menyumbangkan keahlian penting dalam bentuk pengetahuan lokal.

- f. *Determination, Commitment and Stamina*; dalam kolaborasi, sering terjadi fenomena yang disebut sebagai "*collaborative inertia*", di mana terdapat ketidakseimbangan antara pihak yang berpengalaman dan pihak lainnya yang kurang berpengalaman, sehingga tujuan kolaborasi sulit untuk dicapai. Untuk mengatasi situasi ini, komitmen menjadi kunci utama. Tingkat komitmen ini bergantung pada sejauh mana agenda mereka sejalan dalam program kolaborasi, keputusan untuk melanjutkan manfaat kerjasama, dan ketahanan untuk tetap berkomitmen dalam kerja sama tersebut.

Thomson dan Miller (2002), sebagaimana dikutip dalam Whangmahaporn (2012), mengidentifikasi empat dimensi dalam proses kolaborasi. Pertama, dimensi pemerintahan, di mana pemerintah terlibat dalam pembuatan keputusan bersama, mengatur ketentuan dan peraturan, serta melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan bersama. Kedua, dimensi manajemen, melibatkan jaringan manajemen dengan peran dan dukungan yang beragam, termasuk dukungan fasilitas dan keuangan untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, dimensi kemandirian, yang mencakup upaya untuk mengintegrasikan kepentingan publik. Keempat, dimensi pertukaran, yang merupakan aspek penting di mana organisasi-organisasi memperoleh manfaat dari pertukaran informasi, diskusi, dan pengembangan rasa saling percaya di antara mereka.

Peter Smith Ring dan Van De Ven, seperti yang disampaikan oleh Thomson dan Perry (2007) dalam Whangmahaporn (2012), mengusulkan kerangka proses kolaborasi yang terdiri dari empat tahap

utama: (1) negosiasi yang menguntungkan semua pihak terlibat, (2) pembentukan kesepakatan bersama yang akan dilaksanakan di masa mendatang melalui interaksi yang beragam, (3) implementasi keputusan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, dan (4) evaluasi keseluruhan proses. Sementara itu, Bryson (2006) membagi proses kolaborasi menjadi lima bidang utama: (1) pembentukan kesepakatan formal tentang elemen-elemen misi, (2) membangun kepemimpinan dalam kolaborasi, yang mencakup dua jenis kepemimpinan yang memiliki wewenang dan akses terhadap sumber daya serta berkomitmen dalam pelaksanaan kerjasama, (3) membangun legitimasi, (4) membangun kepercayaan dan bekerja bersama-sama, dan (5) perencanaan sebagai salah satu indikator kesuksesan di masa depan.

McGuire (2006:34) mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mendorong organisasi untuk melakukan kolaborasi. Pertama, perubahan sosial saat ini, seperti era informasi dan masyarakat informasi, telah mengubah struktur tugas dan fungsi organisasi menjadi lebih terhubung dan tersebar luas. Keheterogenan tinggi dalam kebutuhan dan aspirasi individu mendorong munculnya jaringan dan kolaborasi sebagai respons alami terhadap kompleksitas ini. Kedua, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah modern tidak dapat diselesaikan secara efisien oleh satu organisasi saja. Isu-isu seperti penanggulangan kemiskinan, masalah kesehatan, pelestarian hutan, dan pengelolaan sumber daya alam membutuhkan pendekatan lintas sektoral. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme yang lebih fleksibel. Kolaborasi antar berbagai sektor dibentuk untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan-tantangan ini.

Kesimpulan dari teori di atas adalah bahwa proses kolaborasi berkembang melalui interaksi antar organisasi dalam berbagai tahapan

yang melibatkan negosiasi, pengembangan komitmen, dan implementasi komitmen tersebut. Proses kolaborasi ini melibatkan lima dimensi utama yaitu pemerintahan, administrasi, otonomi organisasi, kebersamaan, dan norma-norma kepercayaan serta timbal balik. Kolaborasi memerlukan struktur dan aturan yang disepakati bersama, komunikasi yang efektif, serta komitmen yang kuat dari semua pihak terlibat. Proses ini berulang dan tidak linear, di mana keberhasilan awal dan komitmen bersama dapat memperkuat kolaborasi lebih lanjut, sementara kegagalan dalam implementasi dapat memicu negosiasi ulang atau pengurangan komitmen. Kolaborasi dianggap penting untuk mengatasi masalah publik yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja, sehingga diperlukan sinergi antar berbagai sektor untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.

2.4. Program Revitalisasi Cagar Budaya

Menurut Peraturan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, revitalisasi adalah usaha untuk meningkatkan nilai tanah atau kawasan dengan membangun kembali kawasan tersebut untuk meningkatkan fungsi yang telah ada sebelumnya. Kawasan tersebut didefinisikan sebagai area yang memiliki fungsi utama sebagai area lindung atau area untuk budidaya.

Menurut Danisworo (2002), proses revitalisasi suatu kawasan mencakup pengidentifikasian dan pemanfaatan potensi lingkungan seperti sejarah, makna, keunikan lokasi, dan citra tempat. Revitalisasi tidak hanya fokus pada perbaikan fisik semata, tetapi juga mengintegrasikan peningkatan ekonomi masyarakat serta revitalisasi budaya yang ada. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat sangat penting karena melibatkan tidak hanya orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan yang direvitalisasi, tetapi juga masyarakat secara

luas (Laretna, 2002). Dalam konteks mekanisme pengendalian revitalisasi, penting untuk mengangkat isu-isu strategis kawasan baik dari segi sosial-ekonomi maupun karakter fisik kota. Perencanaan kota memainkan peran kunci dalam mengarahkan dan mengendalikan proses ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan dan fungsi baru. Menurut Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya (2013), revitalisasi cagar budaya harus memperhatikan empat aspek utama.:

1. Aspek Fisik

Aspek fisik dari revitalisasi cagar budaya melibatkan restrukturisasi fungsi ruang dan lingkungan cagar budaya untuk meningkatkan nilai signifikansinya.

2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi dari revitalisasi cagar budaya harus mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat kepada masyarakat.

3. Aspek Sosial

Aspek sosial dari revitalisasi cagar budaya bertujuan untuk menginspirasi semangat masyarakat sekitar untuk memajukan cagar budaya.

Pemerintah Kota Metro telah menetapkan 7 cagar budaya dengan dukungan Tim Ahli Cagar Budaya dan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, yang diresmikan melalui Surat Keputusan oleh Walikota Metro. Keputusan ini merupakan langkah konkret dalam mempertahankan warisan sejarah masyarakat Kota Metro, sejalan dengan visi Kota Metro yang berfokus pada keberagaman budaya. Untuk mendukung visi tersebut, Pemerintah Kota Metro terus melakukan kajian lebih lanjut termasuk melalui pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya yang terdiri dari para ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi tentang penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya menginisiasi Program Revitalisasi Cagar Budaya sebagai langkah untuk mengembangkan dan mempertahankan Cagar Budaya yang telah ditetapkan. Tujuan program ini adalah untuk memperkuat kembali nilai-nilai penting yang terkandung dalam Cagar Budaya tersebut, menghindari degradasi baik secara fisik maupun nilai-nilainya akibat berbagai faktor kerusakan. Revitalisasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa Cagar Budaya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sesuai dengan hasil kajian yang telah dilakukan. Proses revitalisasi Cagar Budaya harus dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati dan studi yang mendalam, untuk memastikan kelestariannya tidak terabaikan. Proses ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum.

Rumah Informasi Sejarah (RIS) Dokter Swoning ialah sebuah bangunan peninggalan Belanda yang digunakan untuk dokter-dokter di Kota Metro yang saat ini telah direvitalisasi setelah ditetapkan sebagai bagian dari Daftar Inventaris Cagar Budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Serang dalam Surat Keputusan Kepala BPCB Serang nomor 429/CB4/LL/2015. Setelah penetapan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya berkolaborasi dengan pihak swasta, masyarakat, akademisi, pemerintah, dan komunitas seniman untuk mengembangkan kembali cagar budaya ini. Awalnya, bangunan ini merupakan bangunan kumuh yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), namun kemudian pengelolaannya dialihkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

Salah satu bentuk revitalisasi tersebut yaitu dalam pengelolaan museum. Melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pendirian Museum di Kota Metro, diharapkan bahwa ke depannya Kota Metro akan memiliki

museum yang berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah, dan pariwisata. Dengan demikian, museum diharapkan dapat berfungsi sebagai pelestari lingkungan, sejarah, dan budaya, serta sebagai sarana edukasi bagi generasi muda. Potensi pariwisata yang terkait dengan museum juga diharapkan dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks revitalisasi Rumah Dokter Swoning, partisipasi masyarakat, pemerintah, dan komunitas terlihat dalam berbagai bentuk keterlibatan, seperti yang tergambar dalam gambar berikut:



Gambar 2. Proses Revitalisasi (RIS) Dokter Swoning

Sumber : Sumber : https://www.instagram.com/tacb_metro. 2024

Terlihat pada gambar di atas bahwa sebelum memanfaatkan fungsi Rumah Dokter menjadi museum, perlu adanya revitalisasi fisik yaitu terdapat beberapa bagian kebocoran atap dan adanya deformasi bagian atap yang bentuknya berbeda dengan atap sebelumnya jika melihat arsip foto bangunan Rumah Dokter pada tahun 1940. Dahulu bangunan Rumah Dokter Swoning memiliki dua bangunan dengan atap yang memiliki hiasan kemuncak di ujungnya, baik di bagian depan maupun belakang (*geveltoppen*). Selain itu adanya perbaikan dan penambahan fasilitas lampu, listrik dan air. Proses pembangunan dan pengembangan museum bernuansa klasik modern dengan adanya teknologi informasi yang umumnya digunakan meliputi diorama, permainan interaktif, layar sentuh, film, dan video. Proses revitalisasi ini tidak

hanya melibatkan pemerintah, namun keterlibatan masyarakat dan komunitas masyarakat yang berkontribusi penuh terkait dengan tenaga, dana, maupun bantuan lainnya.



Gambar 3. Bantuan Pengembangan Rumah Informasi Sejarah (RIS)
 Sumber : https://www.instagram.com/tacb_metro. 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam pengembangan Rumah Informasi Sejarah (RIS) Dokter Swoning, terdapat berbagai bantuan yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat dan komunitas sebagai komitmen dalam menjalankan Program Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Metro. Masyarakat juga terlibat melalui kolaborasi dengan sekolah dan berbagai komunitas untuk mengumpulkan minat kunjungan ke museum, serta membantu museum dalam mengorganisir acara-acara positif yang memperkuat peran museum sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan rekreasi

Hasil dari revitalisasi Rumah Dokter menjadi Museum Mini atau Rumah Informasi Sejarah Dokter Swoning menjadi sarana atau wadah bagi masyarakat Kota Metro untuk dapat mengenal lebih dalam sejarah Kota Metro. Saat ini Rumah Informasi Sejarah Kota Metro ramai dikunjungi oleh anak-anak sekolah, peneliti, dosen-dosen universitas, hingga masyarakat yang ingin mengetahui sejarah Kota Metro. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung kurikulum sejarah lokal yang akan dirancang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menjadi kurikulum tetap di Kota

Metro.



Gambar 4. Pemanfaatan Rumah Informasi Sejarah (RIS)
 Sumber : Sumber : https://www.instagram.com/tacb_metro. 2024

Terlihat pada gambar 4 dengan adanya Program Revitalisasi Cagar Budaya yang dilakukan pada bangunan cagar budaya Rumah Informasi Sejarah Kota Metro melalui revitalisasi fisik, untuk sekarang revitalisasi dilanjutkan untuk menghidupkan kembali bangunan cagar budaya yang tentu saja tidak menghilangkan unsur budayanya serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rumah Informasi Sejarah (RIS) Dokter Swoning sekarang sudah menjadi Museum Mini yang menarik pengunjung untuk belajar mengenai sejarah Kota Metro dengan adanya tampilan *storyline* pada bangunan yang menampilkan alur sejarah Kota Metro saat kolonial belanda. Selain itu, adanya juga ada barang- barang peninggalan jaman belanda berupa sepeda, mesin ketik, cangkir dan lainnya. Rumah Informasi Sejarah (RIS) Dokter Swoning juga dimanfaatkan bagi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti adanya *workshop*, sosialisasi maupun kegiatan olahraga seperti basket dan *poundfit*.

Peningkatan literasi anak-anak Kota Metro mengenai sejarah Kota Metro juga meningkat dengan adanya Museum Mini, banyak sekolah yang mengajak anak- anak muridnya untuk berkunjung setiap harinya. Tidak hanya itu, para

peneliti, dosen, mahasiswa serta akademisi lainnya pun sering mengunjungi Rumah Informasi Sejarah (RIS) Kota Metro untuk belajar mengenai sejarah Kota Metro.

Program Revitalisasi Cagar Budaya juga diterapkan dalam pengelolaan museum Klinik Bersalin Santa Maria. Museum ini menampilkan sejarah Klinik Bersalin Santa Maria, yang awalnya merupakan rumah sakit tertua yang dikenal sebagai St. Elisabeth. Klinik ini didirikan oleh suster-suster Fransiskan di bawah bimbingan Pastor M. Neilen, SCJ, yang juga merupakan imam Gereja pertama yang tinggal di Kota Metro. Museum ini memamerkan foto-foto dan sejarah perjalanan Pastor M. Neilen ke Kota Metro, serta barang-barang kesehatan asli dari rumah sakit yang dikelola olehnya, yang dipajang di berbagai sudut ruangan. Selain itu, museum ini menggambarkan sejarah penyebaran Katolik di Lampung, termasuk di Metro, serta sejarah pendirian Rumah Sakit St. Elisabeth pada tahun 1938 yang kemudian berganti nama menjadi Rumah Sakit Santa Maria hingga saat ini.

2.5. *Metro Culinary Night*

Metro Culinary Night adalah sebuah inisiatif Pemerintah Kota Metro yang diselenggarakan oleh komunitas anak muda yang tergabung dalam Metro Creative Production, bertujuan untuk mendorong semangat wirausaha para pelaku UMKM di Kota Metro dan meningkatkan penjualan produk UMKM melalui program Metro Bangga Beli (MB2). Metro Creative Production sendiri merupakan komunitas anak muda yang bertugas mengelola berbagai kegiatan di bawah naungan Metro Creative Hub (MCH). MCH merupakan pusat perkumpulan komunitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, edukasi, dan studio dari berbagai sektor industri kreatif Kota Metro.

Tujuan pendirian *Metro Creative Production* adalah untuk menyediakan ruang bagi para pelaku industri kreatif yang membutuhkan tempat untuk bekerja dan mengembangkan kegiatan kreatif mereka, memberikan fasilitas bagi mereka

untuk mengembangkan bisnis kreatif mereka, menyelenggarakan pelatihan dalam berbagai subsektor industri kreatif, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dalam subsektor industri kreatif untuk membentuk jaringan kreatif yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan industri kreatif. Berikut adalah struktur organisasi *Metro Creative Production* dalam acara *Metro Culinary Night*.

Tabel 3. Struktur Organisasi *Metro Creative Production* dalam *Event Metro Culinary and Finance Fest* tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	M. Riananda Pratama	Ketua
2	Fuji Maharani	Sekretaris
3	Nindi Ika Wulandari	Divisi Acara
4	Eka Putri	Divisi Acara
5	Kimberly Laras	Divisi Humas
6	Ema Ainun	Divisi Humas
7	Dimas Adiansyah	Divisi Perlengkapan
8	Muhammad Ilham F	Divisi Perlengkapan
9	Lucky	Divisi Dekorasi
10	Edo	Divisi Dekorasi
11	Qodrie	Sponsorship
12	Ranissa Fidela	Sponsorship

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Tabel 3 merupakan struktur organisasi pada pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary Night* pertama kali diselenggarakan pada tanggal 23-30 Desember 2022 di Nuwo Intan atau Dekranasda Kota Metro di Jl. Bridgen Sutiyoso No. 50 Metro Pusat. *Metro Culinary Night* bekerja sama dengan Dekranasda Kota Metro dan mendapat dukungan penuh dari berbagai Dinas terkait. Acara ini melibatkan 36 UMKM dari Kota Metro dan 5% dari UMKM dari Bandar Lampung. Selain bazar kuliner UMKM, acara ini juga menyelenggarakan beberapa workshop untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi di kalangan masyarakat.

Kegiatan *Metro Culinary Night* juga berperan dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Metro dalam pelestarian dan pemanfaatan bangunan-bangunan cagar budaya di Kota Metro. Pada saat acara *Kick Off Revitalisasi*

Rumah Asisten Wedana yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 19 Maret 2023, Komunitas *Metro Creative Production* turut berkolaborasi dalam kegiatan revitalisasi tersebut. Mereka bekerja sama dengan BNI, Sosro, merek lokal, dan pelaku UMKM untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi. Keterlibatan mereka menunjukkan komitmen generasi muda melalui *Metro Creative Production* dalam mendukung revitalisasi Rumah Asisten Wedana di Kota Metro.

2.6. Kerangka Pikir

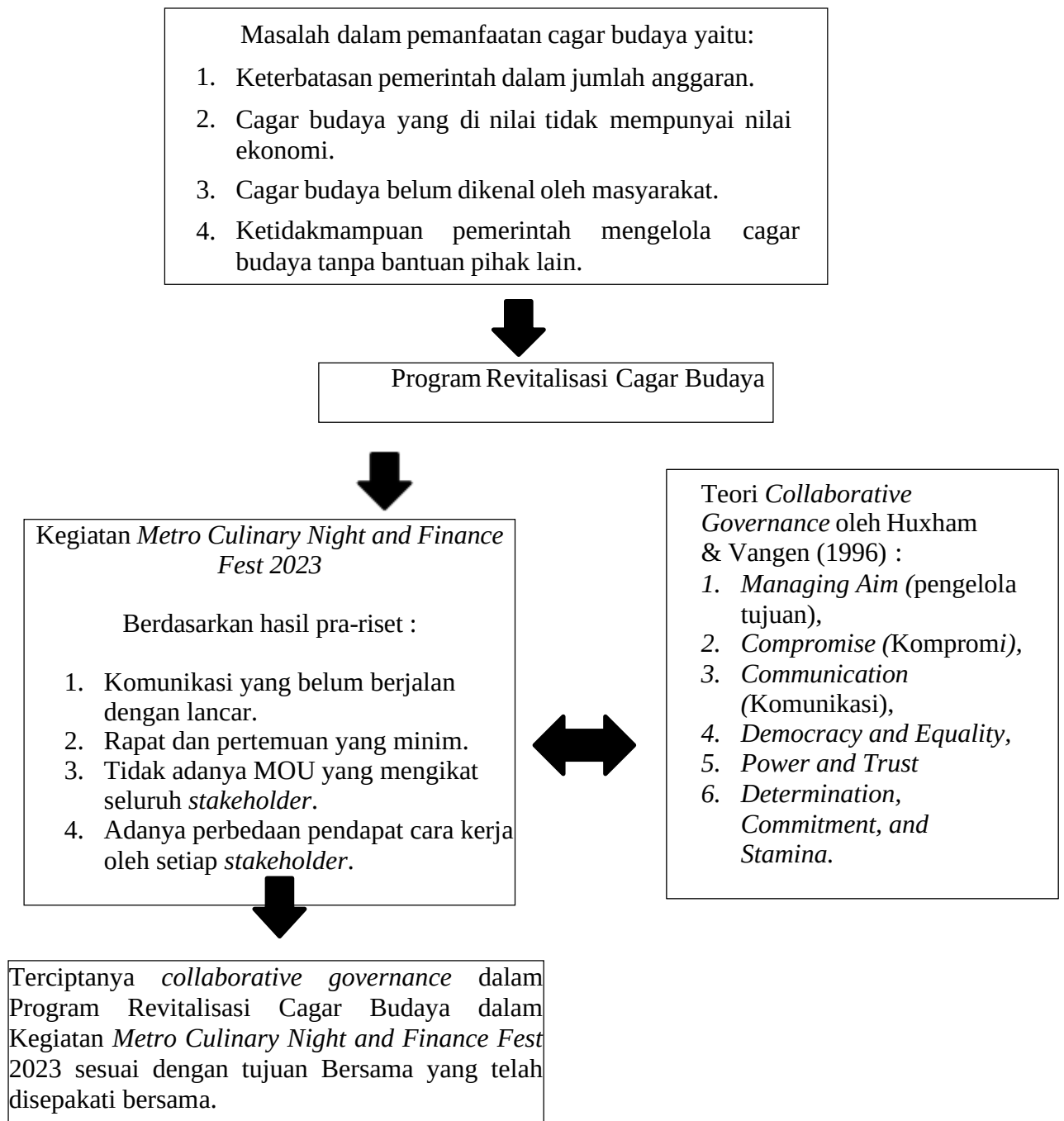
Uma Sekaran dalam (Pasolong, 2013) mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai proses kolaborasi program revitalisasi cagar budaya di Kota Metro dalam kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest 2023*.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis merujuk pada teori proses kolaborasi oleh Huxham dan Vangen (1996) . Teori ini terdapat 6 indikator yaitu : *Managing Aims* (pengelola tujuan), *Compromise* (Kompromi), *Communication* (Komunikasi), *Democracy and Equality*, *Power and Trust* dan *Determination, Commitment, and Stamina*. Permasalahan yang terjadi di dalam proses kolaborasi kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest 2023* dikumpulkan melalui observasi dan wawancara pra- riset oleh beberapa informan terkait, yaitu dengan Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Tim Ahli Cagar Budaya, dan Koor Acara Metro Creative Production. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah:

1. Komunikasi belum berjalan dengan efektif.
2. Rapat dan komunikasi yang minim.
3. Lemahnya komitmen karena belum adanya MoU.

4. Adanya perbedaan pendapat dan cara kerja oleh setiap *stakeholder*.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa dalam proses kolaborasi program revitalisasi cagar budaya di Kota Metro dalam kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest* masih memiliki beberapa permasalahan dan kendala untuk mewujudkan tujuannya yang mengacu pada paradigma pemanfaatan cagar budaya Undang- Undang Nomor 11 tahun 2010 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Huxham dan Vangen (1996) dinilai lebih tepat dan rasional untuk menjawab permasalahan yang terjadi mengenai proses kolaborasi pemerintah, swasta dan *civil society* dalam program revitalisasi cagar budaya di Kota Metro dalam kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*.



Gambar 5. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*, peneliti mengamati kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya merevitalisasi warisan budaya Kota Metro. Untuk mencapai hasil yang valid, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang sesuai untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang kolaborasi tersebut. Menurut Moleong (2004), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena melalui penjelasan yang menggunakan bahasa dan kata-kata dalam konteks alamiah dengan berbagai metode penelitian yang tersedia. Dalam konteks ini, tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam program revitalisasi cagar budaya di Kota Metro dengan diadakannya kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah aspek penting yang membatasi dan mengarahkan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga mencegah pembesaran masalah yang tidak relevan. Fokus penelitian memberikan arah dan panduan yang jelas bagi peneliti dalam menentukan ruang lingkup dan tujuan penelitian. Perumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait karena permasalahan yang diteliti menjadi landasan bagi penentuan fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus penelitian terhadap proses kolaborasi pemerintah, swasta dan *civil society* dalam program revitalisasi cagar budaya di Kota Metro pada pelaksanaan Kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* dengan menggunakan proses kolaborasi menurut Huxham dan Vangen (1996) yang membagi tahapan proses kolaborasi sebagaimana berikut:
 - a. *Managing Aims* dimaksudkan tujuan pengelolaan mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan tujuan dari kolaborasi itu sendiri, termasuk alasan-alasan yang mendasari kedua belah pihak untuk berkolaborasi, sejauh mana kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi, dan landasan pemikiran yang mendasari keputusan untuk berkolaborasi.
 - b. *Compromi*, dalam konteks penelitian ini, dimaksudkan untuk menyoroti bagaimana pandangan dan persepsi yang berbeda-beda disatukan dalam pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*..
 - c. *Communication* yang dimaksudkan adalah bagaimana mengkomunikasikan informasi atau pesan secara efektif untuk menghindari perbedaan persepsi, sehingga setiap pihak yang berkolaborasi memahami dengan jelas apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak.
 - d. *Democracy and Equality*, artinya bahwa dalam penelitian ini mencakup proses pengambilan keputusan yang demokratis dan seimbang, serta bentuk pertanggungjawaban dari setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*.
 - e. *Power and trust*, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya untuk membangun kepercayaan di antara para aktor yang terlibat sehingga kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* dapat terjadi dengan semangat yang kuat.

- f. *Determination, commitment and stamina*, yang dimaksud di sini adalah dengan tekad yang kuat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat yang telah sepakat dan disepakati bersama sebagai dasar yang harus dipegang dalam berkolaborasi.
2. Kesuksesan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*, salah satu tipe kesuksesan kolaborasi yakni *Achieving outcomes*, dimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pencapaian hasil dari aktivitas kolaborasi dalam kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data - data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, bangunan cagar budaya Rumah Asisten Wedana, serta lokasi dari beberapa *stakeholder* yang terkait dalam proses kolaborasi program revitalisasi cagar budaya pada kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest* tahun 2023. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan sebagai berikut:

1. Kota Metro saat ini berupaya menjalankan program Revitalisasi Cagar Budaya melalui upaya pemanfaatan ruang publik di Rumah Asisten Wedana dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa OPD pemerintah, swasta dan civil society.
2. Lokasi penelitian terletak pada kawasan yang mudah dijangkau oleh peneliti.
3. Salah satu lokasi penelitian adalah lokasi peneliti saat melaksanakan magang selama enam bulan, sehingga pengambilan dan memperoleh data menjadi lebih mudah.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Metode utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, yang dianggap sangat penting. Wawancara merupakan metode di mana seorang peneliti menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan langsung kepada informan dengan tujuan untuk menggali dan memperoleh informasi tertentu (Herdiansyah, 2010).

Adapun daftar informasi dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Tanggal	Fokus atau Fungsi Informasi
1	Endang Sukaisih, S.E	Staff Bidang Kebudayaan dan Kebudayaan Kota Metro	21 Juni 2024	Peneliti ingin menganalisis bagaimana peran pemerintah sebagai regulator Program Revitalisasi Cagar Budaya dalam proses <i>collaborative governance</i> dalam kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> dengan mengacu pada teori proses kolaborasi oleh Huxham and Vangen (1996).
2	Hargo Faradiawan	<i>Manager Operasional</i> MpOne Kota Metro	20 Juni 2024	Peneliti ingin menganalisis bagaimana peran atau keterlibatan lembaga swasta yang terlibat dalam proses <i>collaborative</i>

No	Nama Informan	Jabatan	Tanggal	Fokus atau Fungsi Informasi
				<i>governance</i> kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> selaku penyedia alat dan pelatihan untuk menghidupkan cagar budaya.
3	M. Riananda Pratama	Ketua Pelaksana <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i>	24 Juni 2024	Peneliti ingin menganalisis bagaimana peran <i>Metro Creative Production</i> selaku penyelenggara kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> dan yang ikut turut berinovasi dalam menghidupkan cagar budaya dalam proses <i>collaborative governance</i> .
4	Mirza Marta Hidayat, S.E., M.E	Sekretaris BPPRD Kota Metro	21 Juni 2024	Peneliti ingin menganalisis bagaimana peran pemerintah yang ikut serta berkolaborasi dalam bidang literasi keuangan untuk mengetahui bagaimana proses <i>collaborative governance</i> yang berjalan dalam kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> .
5	Novia Ayu Rahmawati	Pelaku Pancong Inyong	UMKM Lumer 26 Juni 2024	Peneliti ingin menganalisis peran partisipasi <i>civil society</i> atau masyarakat yang terlibat dalam proses <i>collaborative governance</i> di kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> .

No	Nama Informan	Jabatan	Tanggal	Fokus atau Fungsi Informasi
6	Vivi Indah. S.Ak ,.M.Ak	<i>Co-Branch Manager BankMandiri Kota Metro</i>	27 Juni 2024	Peneliti ingin menganalisis bagaimana peran lembaga milik pemerintah yang terlibat dalam penyedia layanan bagi masyarakat dalam proses <i>collaborative governance</i> di kegiatan <i>Metro Culinary and Finance Fest 2023</i> .
7	Yogi Fernandho	Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata	22 Juni 2024	Peneliti ingin memvalidasi data terkait dengan alasan tidak terlibatnya Disporapar Kota Metro dalam kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> .
8	Nurdianto	Masyarakat	24 Juni 2024	Peneliti ingin mendapatkan pandangan atau respon masyarakat terkait dengan pencapaian hasil diadakannya kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> .
9	Dini Octarian	Pro Poundfit	27 Juni 2024	Peneliti ingin mendapatkan pandangan atau respon masyarakat terkait dengan pencapaian hasil dalam Rumah Asisten Wedana setelah diadakannya kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> .

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Metode analisis data dari hasil wawancara melibatkan *interpretasi* transkrip wawancara menjadi kalimat-kalimat yang menggambarkan

temuan dari percakapan dengan para informan. Wawancara dilakukan dengan memilih sampel dari berbagai pihak seperti Staff Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, *Manager Operasional MpOne* Kota Metro, Ketua Pelaksana *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*, Sekretaris BPPRD, *Co-Branch Manager* Bank Mandiri Kota Metro, serta secara acak pada pelaku UMKM seperti Pancong Lumer Inyong, dan beberapa informan untuk memperkuat atau validasi argumen yaitu dari instansi Disporapar, masyarakat dan Pro Poundfit. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*).

2. Observasi

Menurut Cartwright (dikutip dalam Herdiansyah, 2010), observasi merujuk pada proses melihat, mengamati, dan mencatat tingkah laku untuk tujuan tertentu. Sementara menurut Nasution (dikutip dalam Sugiyono, 2016), observasi adalah perhatian yang terfokus pada gejala, peristiwa, atau objek tertentu. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung terhadap hasil kolaborasi dalam Program Revitalisasi Cagar Budaya antara instansi pemerintah, swasta, dan *civil society* dalam penyelenggaraan *Metro Culinary and Finance Fest* tahun 2023 di Kota Metro, khususnya di Rumah Asisten Wedana Kota Metro.

Tabel 5. Daftar Observasi Lokasi Penelitian

No	Kegiatan Observasi	Hasil
1	Pengamatan dilakukan pada tanggal 29 April 2024 di Rumah Asisten Wedana. Peneliti melakukan pengamatan terkait dengan hasil dari kolaborasi yang dilakukan beberapa stakeholder dalam kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> . Berdasarkan pengamatan tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa CSR yaitu lampu penerangan dan	

No	Kegiatan Observasi	Hasil
	penambahan fasilitas kamar mandi. Lalu terdapat beberapa penambahan fasilitas seperti lapangan basket, tenant kuliner, studio foto hingga steam motor.	 
	Pengamatan dilakukan pada tanggal 30 April 2024 di Rumah Asisten Wedana. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pemanfaatan cagar budaya setelah terjadinya kolaborasi. Berdasarkan hasil pengamatan halaman depan Rumah Asisten Wedana dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan nonton bersama oleh masyarakat. Seperti saat pengamatan, para masyarakat sedang bersiap untuk nobar bersama untuk menyaksikan gelaran Piala Asia. Penambahan fasilitas juga nampak saat pengamatan yaitu sebuah ruang yang dimanfaatkan untuk penyewaan permainan billiard.	 

No	Kegiatan Observasi	Hasil
	Pengamatan dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Mei 2024 di Rumah Asisten Wedana. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pemanfaatan cagar budaya setelah terjadinya kolaborasi. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa fasilitas dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, salah satunya untuk berolahraga.	 

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode penelitian kualitatif yang memanfaatkan media tertulis dan dokumen lain yang dibuat oleh subjek untuk memperoleh sudut pandang subjek tersebut (Herdiansyah, 2010). Dokumentasi ini mencakup catatan-catatan masa lalu seperti tulisan, gambar, karya monumental, dan dokumen lainnya. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara, serta meningkatkan validitas data penelitian. Proses dokumentasi melibatkan penyimpanan arsip atau dokumen yang relevan dan diperlukan untuk penelitian, seperti surat keputusan, catatan, laporan kegiatan, foto, dan tulisan lain yang dianggap relevan oleh peneliti terhadap topik penelitian yang diselidiki.

Tabel 6. Data Dokumen Penelitian

No	Nama Dokumen	Substansi Dokumen
1	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Aturan atau payung hukum penyelenggaraan kegiatan Metro Culinary Night and Finance Fest 2023.
2	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya	Aturan atau payung hukum penyelenggaraan kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> .
3	Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya	Tentang aturan atau payung hukum penyelenggaraan kegiatan Metro Culinary Night and Finance Fest 2023.
4	Surat Izin Permohonan Peminjaman Lokasi untuk kegiatan <i>Metro Culinary and Finance Fest</i> tahun 2023	Ketentuan atau aturan dalam penggunaan bangunan cagar budaya di Kota Metro.
5	Proposal Kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i>	Panduan yang jelas dan komprehensif untuk pelaksanaan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> .
6	Surat Perjanjian Mekanisme dan Ketentuan Kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i>	Berfungsi terkait dengan kepatuhan hukum, transparansi terkait dengan anggaran yang dikelola, pengaturan mekanisme dan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i>
7	Rundown Kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest</i> tahun 2023	Jadwal mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan <i>Metro Culinary Night and Finance Fest 2023</i> .

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Untuk memverifikasi keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknis (Sugiyono, 2016). Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber untuk memverifikasi

kredibilitas data. Data dari satu sumber diuji dengan berbagai metode (Sugiyono, 2016). Setelah wawancara selesai, data yang dikumpulkan melalui wawancara divalidasi melalui observasi atau dokumentasi, yang menjamin bahwa data yang dikumpulkan dari informan penelitian yang menjadi sumber utama penelitian lebih konsisten, akurat, dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, penggunaan teknik triangulasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjamin data yang diperoleh dari informan penelitian lebih konsisten, valid, dan pasti sehingga dapat diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Triangulasi sumber dalam penelitian kualitatif berarti membandingkan dan menguji kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dengan menggunakan metode ini, peneliti membandingkan data wawancara yang dikumpulkan dari masing-masing sumber atau informan yang terlibat dalam penelitian untuk memastikan bahwa informasi yang diperolehnya benar.

3.5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian oleh peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan seperti Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Owner MpOne Kota Metro, Ketua Pelaksana Metro *Culinary Night and Finance Fest* tahun 2023, serta melakukan pemilihan sampel acak pada pelaku UMKM, pihak swasta yang mendukung kegiatan ini, dan *civil society* yang terlibat. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*).

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber informasi tertulis seperti surat keputusan, catatan-catatan, arsip, buku literatur, laporan kegiatan, foto-foto, dokumen, dan tulisan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan literatur yang berkaitan dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam program revitalisasi cagar budaya di Kota Metro, khususnya dalam acara *Metro Culinary Night and Finance Fest* tahun 2023.

3.6. Teknik Analisis Data

Metode dalam analisis data kualitatif dilakukan sepanjang proses penelitian, dari pengumpulan data hingga penyelesaian. Peneliti menganalisis respons dari responden selama wawancara, dan jika diperlukan, pertanyaan tambahan diajukan untuk memastikan data yang diperoleh kredibel. Analisis data dilakukan untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, meliputi langkah-langkah pengumpulan data, pemasukan data ke dalam sistem, analisis data, pengambilan kesimpulan, verifikasi, dan penyajian hasil dalam bentuk naratif. Moleong (2017) menguraikan tahapan analisis data kualitatif sebagai berikut.:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan mengambil data yang terkumpul dari lokasi penelitian dan menyusunnya dalam bentuk ringkasan atau laporan yang komprehensif. Dalam penelitian ini, peneliti mengurangi data dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian, kemudian menyajikannya dalam bentuk ringkasan atau laporan yang menyeluruh. Selanjutnya, hasil dari penelitian lapangan direview, poin-poin penting yang menjadi fokus penelitian disorot, dan kesimpulan dari penelitian disajikan.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan langkah kedua dalam proses analisis data. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami gambaran keseluruhan atau aspek-aspek tertentu dari penelitian. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Data bisa disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, foto, grafik, atau jenis visual lainnya.

3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan adalah proses analisis yang bertujuan untuk menemukan pola, tema, persamaan, hipotesis, dan aspek lain yang diinterpretasikan dalam bentuk kesimpulan. Data ditambahkan dan diverifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan bukti yang kuat ("*grounded*"), artinya setiap kesimpulan didasarkan pada data yang tersedia selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengekstraksi inti dari berbagai kategori hasil penelitian yang didasarkan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan.

3.7. Teknik Keabsahan Data

1. Uji Kepercayaan (*Credibility*)

Menurut Sugiyono (2016), terdapat enam strategi untuk meningkatkan kredibilitas dalam penelitian, yaitu observasi, ketekunan penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan triangulasi data. Pendekatan ini melibatkan deskripsi hasil wawancara oleh peneliti dan membaginya berdasarkan konteks tempat, waktu, serta relevansi teori yang digunakan untuk menguatkan validitas hasil penelitian.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Peneliti mencoba memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya sehingga pembaca menjadi jelas dan paham terhadap hasil penelitian ini.

3. Uji Pemeriksaan Kebergantungan (*Dependability/ Reabilitas*)

Peneliti melakukan uji *dependability* dengan cara memeriksa keseluruhan proses penelitian dan data yang diperolehnya. Disengaja atau tidak, peneliti terkadang memberikan data tanpa melakukan observasi, yang harus diuji kembali untuk memastikan kebenaran data yang diberikannya.

4. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Menguji *confirmability* dilakukan peneliti dengan menguji hasil penelitian yang telah dihasilkan dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan selama penelitian untuk memenuhi standar *confirmability*. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui proses penelitian yang hanya ada hasil tanpa ada sebuah prosesnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka, proses *collaborative governance* Program Revitalisasi Cagar Budaya dalam kegiatan *Metro Culinary and Finance Fest 2023* berdasarkan enam dimensi yaitu *Managing Aims, Compromise, Communication, Democracy and Equality, Power and Trust* dan *Determination, Commitment and Stamina* serta pencapaian hasil dari kolaborasi di Kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Proses kolaborasi dalam Program Revitalisasi Cagar Budaya dengan terselenggaranya Kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* sudah terealisasi dengan baik jika dilihat dari proses kolaborasi menurut Huxham & Vangen (1996) yang mencakup enam dimensi yaitu :
 - a) *Managing Aims* atau pengelola tujuan, seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* sudah berjalan dengan baik, seluruh *stakeholder* sudah memahami tujuan diadakannya kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* walaupun masing-masing *stakeholder* memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda dalam mengikuti kegiatan ini, namun dengan adanya diskusi dan berbagi pemahaman antar *stakeholder*, tujuan bersama yang dikelola dengan adanya kesamaan misi serta adanya peran kepemimpinan sehingga tujuan yang utama diadakannya kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* yang akan dicapai dapat dipahami dan terlaksanakan dengan baik
 - b) *Compromise* atau kompromi yang dibangun dalam pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* yaitu dengan

diadakannya musyawarah untuk mengatasi perbedaan kepentingan, pendapat serta carakerja yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Kompromi yang dijalankan selama proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam proses pembagian tanggung jawab antar *stakeholder* dan kompromi terkait dengan permasalahan untuk mencari jalan tengah terkait dengan permasalahan yang menjadi kendala selama proses kolaborasi berlangsung.

- c) *Communication* atau komunikasi yang dijalani oleh setiap *stakeholder* sudah berjalan dengan baik. Penyampaian informasi dilakukan oleh seluruh *stakeholder* dengan diadakannya diskusi atau musyawarah secara langsung maupun secara *online* menggunakan media sosial, *WhatsApp* serta telepon. Hal ini bertujuan untuk terus memberi informasi tentang perkembangan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*.
- d) *Democracy and Equality* dalam proses pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dalam proses pengambilan diwujudkan dengan prinsip demokrasi atau kesetaraan melalui pengambilan keputusan yang menyertakan seluruh *stakeholder* untuk bisa menyampaikan pendapat danikut serta dalam pengambilan keputusan bersama-sama tanpa membedakan derajat atau kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder*.
- e) *Power and Trust* atau aspek kepercayaan dan kekuatan dalam proses pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* sudah diwujudkan dengan adanya sikap saling melengkapi oleh setiap *stakeholder* terkait dengan adanya kekuatan yang dimiliki masing-masing *stakeholder* seperti adanya kekuatan sumber daya, pengalaman, pengetahuan lokal dan kapabilitas oleh setiap *stakeholder*. Hal ini yang menjadikan adanya rasa kepercayaan antar

setiap *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi ini.

- f) *Determination, Commitment and Stamina* atau aspek tekad, komitmen dan stamina yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* dalam menjalankan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* sangat kuat. Dapat dilihat dengan adanya payung hukum dan pertanggungjawaban setiap *stakeholder* serta banyaknya bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Revitalisasi Cagar Budaya Kota Metro dengan diselenggarakannya kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*.
2. Pencapaian hasil dalam kolaborasi Program Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Metro melalui kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023* dengan adanya wajah baru Rumah Asisten Wedana yang saat ini dikenal “*Wedana Space*” yang digunakan sebagai wadah atau ruang kreatif bagi masyarakat Kota Metro dengan adanya tenant food, studio foto, *coffe shop*, serta pemanfaatan dalam kegiatan formal maupun non formal yang disediakan bagi instansi dan masyarakat sekitar. Berbagai pihak pun banyak berpartisipasi dalam program ini untuk berkomitmen terhadap pengembangan cagar budaya dengan adanya beberapa CSR dari berbagai kalangan.

5.2. Saran

1. Saran Teoritis :
 - a. Diharapkan peneliti dapat menganalisis lebih lanjut secara mendalam bagaimana konsep-konsep seperti manajemen tujuan bersama, kompromi dalam pengambilan keputusan, dan pengembangan kepercayaan dapat diterapkan secara praktis dalam konteks revitalisasi cagar budaya. Ini dapat membantu memahami faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi antara

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

- b. Diharapkan peneliti dapat melakukan studi kasus komparatif dengan proyek revitalisasi cagar budaya lainnya yang melibatkan kolaborasi serupa di tempat lain. Hal ini membantu dalam membandingkan strategi kolaborasi yang berhasil dan faktor-faktor kunci yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi.

2. Saran Praktis

- a. Perlu diadakan forum diskusi yang dapat mempertemukan seluruh *stakeholder* yang berkolaborasi secara rutin untuk komunikasi dan koordinasi agar berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat proses berjalannya kolaborasi. Pertemuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi seperti *Zoom*, *Google Meet*, *WhatsApp*, dan aplikasi lainnya yang mendukung.
- b. Menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab kepada masyarakat dengan terus mengenalkan cagar budaya yang ada di Kota Metro dan juga menerapkan pemeliharaan terhadap fasilitas umum yang ada dilingkungan Rumah Asisten Wedana agar terus dipelihara sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang Panjang.
- c. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi kegiatan tahunan yang dapat melibatkan lebih banyak *stakeholder* dalam bentuk kolaborasi dan sehingga di kegiatan berikutnya dapat ditingkatnya lagi kesiapan Tim *Metro Creative Production* dalam pelaksanaan kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest 2023*.
- d. Perlu adanya keterlibatan atau keterwakilan Dinas UMKM dan Disporapa yang tidak hanya sebatas mendukung kegiatan *Metro Culinary Night and Finance Fest*, namun ikut andil dalam perencanaan, menyumbangkan sumber daya, pengalaman hingga

pengetahuan sehingga kegiatan dapat lebih efektif dan memastikan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif yang maksimal bagi UMKM dan perkembangan pariwisata Kota Metro secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Albrecht, C., & Doherty, A. (2021). Stakeholder Engagement in Collaborative Governance: A Review of the Literature and Implications for Public Management. *Public Management Review*, 23(1), 43–62.
- Almaahi, M. H., Myrna, R., & Karlina, N. (2022). Collaborative Governance dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah Melalui Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 256–265. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41312>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543–571.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aristy, K. W., Candradewini, & Buchari, R. A. (2021). Proses Kolaboratif dalam Pengembangan Geopark Pongkor sebagai Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bogor. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 138–142. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35064>
- Berliana, A. (2021). *Peran dan Fungsi Kota Metro sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan di Provinsi Lampung terhadap Daerah Sekitar* [Skripsi, Institut Teknologi Sumatera]. <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2101260014>
- BPS Kota Metro. (2023). *Kota Metro dalam Angka 2023*. CV. Jaya Wijaya.
- BPS Provinsi Lampung. (2023). *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020*. CV. Jaya Wijaya.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2009). Designing and

- Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 69(s1), S6-S18.
- Cameron, K. S., Quinn, R. E., DeGraff, J., & Thakor, A. V. (2014). *Competing Values Leadership* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Danisworo, M. (2002). *Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota*. Urdu Vol. 13.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Sharpe.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200–210. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. (2021). *LAKIP: Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. (2022). *LAKIP: Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Disdukcapil Kota Metro. (2024). *Jumlah Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Metro*.
- Dwiyanto, A. (2008). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia: Mencari Identitas*. Gadjah Mada University Press.
- Eka, Priya Wanitra (2021). Peran Komunikasi Informal dalam Kolaborasi Antar Organisasi. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 13(2), 123–135.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Faidati, N., & Muthmainah, N. F. (2019). Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3, 1–6.
- Gray, B. (1989). *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*. Jossey-Bass.
- Gunawan, A., & Ma'ruf, M. F. (2020). Collaborative Governance dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Jurnal of Public Sector Innovation*, 8(2), 1–10. <https://doi.org/10.26740/publika.v8n2.p%25p>

- Haris, R. A., Findriasih, & Hidayat, I. (2022). Pengembangan Wisata Bukit Tawap Leng-Leng dalam Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal Public Corner Fisisp Universitas Wiraraja*, 17(2), 72–90. <https://doi.org/10.24929/fisip.v17i2.2223>
- Hastuti, S. P. (2015). Pengelolaan Pariwisata Heritage di Kota Semarang: Tantangan dan Strategi Kolaborasi. *Jurnal Pariwisata*, 7(1), 15–27.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kaulitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika. Jakarta
- Huxham, C., & Hibbert, P. (2008). Manifesto for Relational Research and Practice. *British Journal of Management*, 19(1), 1-16.
- Huxham, C., & Vangen, S. (1996). Working Together: Key Themes in The Management of Relationships Between Public and Non-Profit Organizations. *International Journal of Public Sector Management*, 9(7), 5–17.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2005). *Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage*. Routledge.
- Imron, M. (2020). Kolaborasi Quadruple Helix dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas di Desa Palaan. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p68-74>
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2003). Collaborative Policymaking: Governance through Dialogue. In *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society* (hal. 33–59). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490934.003>
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Karlina, Ismanto, S. U., & Buchori, R. A. (2021). Kolaborasi dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Desa Karangsong. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 75–82. <https://doi.org/10.24198/jane.v12i2.28687>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2005). Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004. *World Bank Policy Research Working Paper Series No. 3630*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.718081>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya*.
- Kim, S., & Lee, J. (2020). Transparency and Trust in Government: The

- Moderating Role of Communication and Stakeholder Engagement. *Public Administration Review*, 80(3), 428–439.
- Kolk, A., & Pinkse, J. (2005). Business Responses to Climate Change: Identifying Emergent Strategies. *California Management Review*, 47(3), 6–20. <http://dx.doi.org/10.2307/41166304>
- Kurnia, D., Santoso, B., & Wijaya, R. (2020). *Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Revitalisasi Cagar Budaya*. Penerbit ITB.
- Kurniadi, K., & Sumarna, E. (2022). Proses Kerjasama Pengaturan PKL di Kota Bandung. *Laporan Kualitatif*, 27(5), 1439-1455. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5458>
- Kurniadi. (2020). *Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur*. Grup Penerbitan CV Budi Utama. Bandung
- Laretna, A. (2002). *Revitalisasi Bukan Sekedar "Beautification."* Urdu. Vol. 13. www.urdu.org (Urban and Regional Development Institute)
- Maharani, N. (2022). *Colaborative Governance dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Lampung Tengah* [Skripsi, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/65851/>
- Mahindra, D. A., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya (Studi pada Jalan Panggung Kota Lama, Surabaya). *Publika*, 10(1), 219–230. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p219-230>
- Maulidah, N. L. (2023). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kota Tua Jakarta* [Skripsi, Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/8008/>
- Maylani, T., & Mashur, D. (2019). Collaborative Governance dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Politik*, 10(2), 105-110. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v10i2.7870>
- Metro Creative Hub. (2023). *Metro Creative Hub*. <https://creativehub.metrokota.go.id/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>

- Nafisah, S. V. (2023). *Collaborative Governance dalam Mengatasi Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat Melalui Program Kotaku di Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang* [Skripsi, Universitas Tidar]. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13425
- O'Leary, R., Gerard, C., & Bingham, L. B. (2006). Introduction to the Symposium on Collaborative Public Management. *Public Administration Review*, 66(1), 6–9. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00661.x>
- Oktavia, V. (2024). *Masa Depan Wisata Sejarah di Kota Metro*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/07/masa-depan-wisata-sejarah-di-kota-metro>
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, 1 (2022).
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendirian Museum.
- Peraturan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan atau Cagar Budaya.
- Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, 1 (2023).
- Prasetyo, A. (2023). Optimalisasi Kolaborasi Antar Sektor untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 15(1), 45–60.
- Prastiwi, R., & Ahdiyana, M. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Emping Singkong di Kalurahan Ringinharjo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(2). <https://doi.org/10.21831/joppar.v8i2.20694>
- Priono, S., & Rusli, Z. (2023). Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis Collaborative Governance oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Tambusai*, 7(2), 16011–16017. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8907>
- Putra, A., & Rini, S. (2023). Pengelolaan Kolaborasi Antar-Stakeholder dalam Pengembangan UMKM: Pentingnya Komunikasi Efektif dan Pengelolaan Tujuan Bersama. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Mikro*, 5(2), 45–62.

- Putri, D. A., & Wibowo, S., Revi, H.A (2020). Revitalisasi Cagar Budaya dalam Meningkatkan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Bantul. Penerbit Graha Ilmu.
- Rahayu, D. (2022). *Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Berkelanjutan di Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Rahman, N. K., Utami, S. B., & Pancasilawan, R. (2021). Kolaborasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kreatif di Kota Bandung Studi pada Bandung Creative Belt Sektor Cigadung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 74–88. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35033>
- Rahmawati, L. (2023). Peran Feedback dalam Kolaborasi Proyek Pembangunan Perkotaan. *Jurnal Manajemen dan Komunikasi*, 14(1), 98–115.
- Ramsiah. (2020). *Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Cagar Budaya*. Penerbit Andi. Jakarta Utara
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264.
- Rudi. (2021). *Kolaborasi dalam Program Inovasi Delivery Passport Service di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar* [Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12573/>
- Sahita, N. E., & Maruf, M. F. (2020). Collaborative Governance dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro (Studi pada Pemerintah Desa Bandungrejo, PT. Pertamina EP Cepu, dan Institute Development of Society). *Publika - e-journal UNESA*, 8(3), 1–10. <https://doi.org/10.26740/publika.v8n3.p%25p>
- Salombe, G. P. (2023). *Collaborative Governance: Pengelolaan Desa Wisata di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* [Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta]. <http://repo.apmd.ac.id/2848/>
- Sanjaya, D. (2021). *Collaborative Governance dalam Pemanfaatan Cagar Budaya di Kota Metro*. [petitum.id. https://www.petitum.id/2021/09/28/collaborative-governance-dalam-pemanfaatan-cagar-budaya-di-kota-metro/](https://www.petitum.id/2021/09/28/collaborative-governance-dalam-pemanfaatan-cagar-budaya-di-kota-metro/)
- Saputra, P. R., Lendra, I. W., Destrilia, I., & Wahyuni, F. (2022). Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif Lampung dalam Perspektif Collaborative Governance. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 13(1), 33–48.

<https://doi.org/10.23960/administratio.v13i1.278>

- Sarbana, B., Saleh, A., Fatchiya, A., & Firdaus, M. (2023). Analisis Efektivitas Komunikasi Pemangku Kepentingan untuk Keberlanjutan Bisnis UMK di Geopark Pongkor. *Jurnal Penyuluhan*, 19(1), 104–116. <https://doi.org/10.25015/19202343488>
- Setiawan, A. (2022). *Efektivitas Rapat Formal dalam Proyek Kolaborasi Pemerintah dan Swasta di Indonesia*. Skripsi, Universitas Indonesia.
- Setyawan, T. (2021). Saling Berbagi Pemahaman dalam Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Kolaborasi*, 8(2), 45–60.
- Smith, J. A., & Osborn, M. (2007). Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research. In *Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods* (hal. 53–80). Sage Publications.
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. SmartMedia. Solo
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan tentang Isu Pedagang Kaki Lima dan Konflik Antar Kelompok*. Universitas Sebelas Maret Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Sujarwoto. (2013). *Essays on Decentralisation, Public Services and Well-Being in Indonesia*. The University of Manchester.
- Sururi, A. (2018). Collaborative Governance sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). *Humanika*, 25(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/humanika.v25i1.18482>
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2007). Collaboration Processes: Inside the Black Box. *Public Administration Review*, 66(s1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x>
- Wahyuningsih, S. (2018). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apparalang sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Bulukumba*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Warsono, S. (2009). *Corporate Governance Concept and Model*. Center of Good Corporate Governance.
- Whangmahaporn, P. (2012). Collaboration of Public Service of Phayao Elderly School, Northern Thailand. *Journal of Government and Politics*, 3(2), 284–296. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0015>

- Wijayanti, L. (2018). Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan Kawasan Kota Tua Surabaya. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2), 45–59.
- Wulandari, S. (2023). *Strategi Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Pariwisata di Bali*. Skripsi, Universitas Udayana.
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>
- Yuliani, R. (2023). Membangun Kepercayaan melalui Komunikasi Transparan dalam Kolaborasi Multi-Stakeholder. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 17(1), 89–102.
- Yulianto, H. (2022). Pengaruh Komunikasi terhadap Feedback dalam Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 12(1), 75–89.